

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun 2013, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan terutama untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini berguna untuk memberikan informasi kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 28 Februari 2014
Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional
K e p a l a,

Prof. dr. Fasi Jalal, Ph.D, SpGK
NIP. 195309011982031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Pernyataan tanggung Jawab	
Daftar isi	
Daftar Tabel	
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Catatan Atas Laporan Keuangan	6
A. PENJELASAN UMUM	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Kebijakan Teknis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.4. Kebijakan Akuntansi	11
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	18
B.1 Pendapatan Negara Dan Hibah	18
B.2. Belanja Negara	23
B.2.1 Belanja Pegawai	26
B.2.2 Belanja Barang	26
B.2.3 Belanja Modal	27
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA	30
C.1. Aset Lancar	30
C.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran	30
C.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan	32
C.1.3 Kas Lainnya Dan Setara Kas	32
C.1.4 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	34
C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Tp/Tgr)	35
C.1.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan (Tp/Tgr)	37
C.1.7 Persediaan	38
C.2 Aset Tetap	38
C.2.1 Tanah	39
C.2.2 Peralatan Dan Mesin	40
C.2.3 Gedung Dan Bangunan	45
C.2.4 Jalan, Irigasi Dan Jaringan	49
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	51
C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	52
C.2.7 Akumulasi Penyusutan	53
C.3 Piutang Jangka Panjang	54
C.3.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya	54
C.3.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	55
C.4 Aset Lainnya	56
C.4.1 Aset Tak Berwujud	56
C.4.2 Aset Lain-Lain	58
C.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	60

C.5. Kewajiban Jangka Pendek	60
C.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga.....	60
C.5.2Uang Muka Dari KPPN	61
C.5.3Pendapatan Diterima Dimuka	61
C.5.4Pendapatan Yang Ditangguhkan	61
C.6 Ekuitas Dana Lancar	61
C.6.1Cadangan Piutang	61
C.6.2Cadangan Persediaan	62
C.6.3Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	62
C.6.4Ekuitas Dana Lancar Lainnya	62
C.6.5 Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima	63
C.6.6 Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan	63
C.7 Ekuitas Dana Investasi	63
C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	63
C.7.2Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	63
D. Pengungkapan Penting Lainnya	64
D.1.Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	64
D.2.Informasi Pendapatan Dan Belanja Akrual	64
D.3.Rekening Pemerintah	64
D.4.Pengungkapan Lain-Lain	64

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Ringkasan LRA periode 1 Jan s/d 31 Des 2013 dan periode 1 Jan s/d 31 Des 2012..... 1
 Tabel. 2 RINGKASAN NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN PER 31 DESEMBER 2012 2
 Tabel. 3 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA..... 10
 Tabel. 4 Penggolongan Kualitas Piutang 16
 Tabel. 5 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap 18
 Tabel. 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan..... 18
 Tabel. 7 Perbandingan PNPB Periode 1 Jan s/d 31 Des 2013 & Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012 19
 Tabel. 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Periode 1 Jan s/d 31 Des 2013 24
 Tabel. 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 25
 Tabel. 10 Perbandingan Belanja Periode 1 Jan s/d 31 Des 2013 & Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012 25
 Tabel. 11 Perbandingan Belanja Pegawai 1 Jan s/d 31 Des 2013 & 1 Jan s/d 31 Des 2012 26
 Tabel. 12 Perbandingan Belanja Barang 1 Jan s/d 31 Des 2013 dan 1 Jan s/d 31 Des 2012 27
 Tabel. 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 1 Jan s/d 31 Des 2013 & 1 Jan s/d 31 Des 2012 28
 Tabel. 14 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 30
 Tabel. 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja per 31 Des 2013 31
 Tabel. 16 Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 31
 Tabel. 17 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Satuan Kerja per 31 Des 2013 32
 Tabel. 18 Rincian Penyetoran Kas di Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 33
 Tabel. 19 Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2013 35
 Tabel. 20 Rincian Bagian Lancar Tagihan (TP/TGR) 35
 Tabel. 21 Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan (TP/TGR) per 31 Desember 2013 38
 Tabel. 22 Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 38
 Tabel. 23 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2013 39
 Tabel. 24 Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah per 31 Desember 2013 39
 Tabel. 25 Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 40
 Tabel. 26 Penambahan dan Pengurangan Nilai Gedung, Bangunan per 31 Desember 2013 46
 Tabel. 27 Penambahan dan Pengurangan Nilai jalan, Irigasi, Jaringan per 31 Desember 2013 49
 Tabel. 28 Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 51
 Tabel. 29 Penambahan & Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Des 2013 52
 Tabel. 30 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 54
 Tabel. 31 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jk panjang lainnya per 31 Des' 2013 56
 Tabel. 32 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2013 56
 Tabel. 33 Rincian Aset tak Berwujud per Satker per 31 Desember 2013 57
 Tabel. 34 Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 57
 Tabel. 35 Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 58
 Tabel. 36 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 60
 Tabel. 37 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 60
 Tabel. 38 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013 61
 Tabel. 39 Rincian Dana disediakan utk pembayaran Utang Jk Pendek per 31 Des 2013 62

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Audited Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 13.880.254.221,-.

Realisasi Belanja Negara pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 2.411.701.518.255,- atau mencapai 89,42 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.697.010.456.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012

	(dalam rupiah)			
	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2013			Periode 1 Jan s/d. 31 Des 2012
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	-	13,880,245,221	-	5,924,115,160
Belanja Rupiah Murni	2,673,545,923,000	2,369,813,327,805	88.64	2,197,911,035,689
Belanja Pinjaman dan Hibah	23,464,533,000	22,353,926,959	95.27	15,772,646,431
Belanja Non Kas		19,534,263,491		
JUMLAH BELANJA	2,697,010,456,000	2,411,701,518,255	89.42	2,213,683,682,120

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per 31 Desember 2013 dan Per 31 Desember 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset Audited per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1.224.540.797.397,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 549.065.720.153,00 Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 648.911.838.157,00, Piutang Jangka Panjang (neto setelah akumulasi penyusutan) Rp 0,00 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 26.563.239.087,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 15.015.064.132,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 1.209.525.733.265,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 534.050.656.021,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 675.475.077.244,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel.2RINGKASAN NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN PER 31 DESEMBER 2012

	(dalam rupiah)		Nilai kenaikan/ (penurunan)	
	Per 31 Des 2013	Per 31 Des' 2012	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	549.065.720.153	636.253.250.179	(87.187.530.026)	(13,70)
Aset Tetap	648.911.838.157	944.773.377.927	(295.861.539.770)	(31,32)
Aset Lainnya	26.563.239.087	29.516.961.719	(2.953.722.632)	(10,01)
Panjang	-	1.340.514	(1.340.514)	-
JUMLAH ASET	1.224.540.797.397	1.610.544.930.339	(386.004.132.942)	(23,97)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	15.015.064.132	3.823.690.394	11.191.373.738	292,69
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	534.050.656.021	632.429.559.785	(98.378.903.764)	(15,56)
Ekuitas Dana Investasi	675.475.077.244	974.291.680.160	(298.816.602.916)	(30,67)
JUMLAH EKUITAS DANA	1.209.525.733.265	1.606.721.239.945	(397.195.506.680)	(24,72)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.224.540.797.397	1.610.544.930.339	(386.004.132.942)	(23,97)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Periode 1 Jans/d31 Des 2013 dan Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012

Uraian	Catatan	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2013			Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan	B.1				
1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	-	13,880,254,221	-	5,924,115,160
Jumlah Pendapatan		-	13,880,254,221	-	5,924,115,160
Belanja	B.2				
Belanja Transaksi Kas	B.2.1				
1 Belanja Pegawai	B.2.1.1	343,478,146,000	304,630,741,629	88.69	333,162,648,174
2 Belanja Barang	B.2.1.2	2,263,378,334,000	2,005,997,299,273	88.63	1,806,774,668,733
3 Belanja Modal	B.2.1.3	90,153,976,000	81,539,213,862	90.44	73,746,365,213
Jumlah Belanja Transaksi Kas		2,697,010,456,000	2,392,167,254,764	88.70	2,213,683,682,120
Belanja Transaksi Non Kas	B.2.2				
1 Belanja Pegawai		-	-	-	-
2 Belanja Barang	B.2.2.1	-	19,534,263,491	-	-
3 Belanja Modal		-	-	-	-
Jumlah Belanja Transaksi Non Kas		-	19,534,263,491	-	-
Jumlah Belanja		2,697,010,456,000	2,411,701,518,255	89.42	2,213,683,682,120

II. NERACA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NERACA PER 31 Desember 2013 DAN PER 31 Desember 2012

Nama Perkiraan	Catatan	PER 31 Desember 2013	PER 31 DES 2012
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	11,483,264,463	3,678,008,618
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	6,253	6,253
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	2,969,737,920	143,063,977
Jumlah Kas dan Bank		14,453,008,636	3,821,078,848
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.4	28,199,999	55,033,333
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.7	353,064,478	1,347,250
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.8	(1,765,323)	-6,736
Persediaan	C.1.9	534,233,212,363	632,375,797,484
JUMLAH ASET LANCAR		549,065,720,153	636,253,250,179
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	368,802,024,366	366,783,710,993
Peralatan dan Mesin	C.2.2	353,804,920,192	298,558,585,479
Gedung dan Bangunan	C.2.3	255,705,326,222	239,433,632,412
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	22,224,046,832	17,278,957,020
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	4,263,911,292	4,153,389,332
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	11,967,763,000	18,565,102,691
Akumulasi Penyusutan		(367,856,153,747)	
JUMLAH ASET TETAP		648,911,838,157	944,773,377,927
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR		0	1,347,250
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.3.1	8,499,808,374	8,499,808,374
Penyisihan piutang tidak tertagih-tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi	C.3.2	0	(6,736)
Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang jangka Panjang Lainnya	C.3.4	(8,499,808,374)	(8,499,808,374)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	1,340,514
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	26,226,808,520	21,769,745,654
Aset Lain-lain	C.4.2	6,354,214,272	7,747,216,065
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset lainnya		(6,017,783,705)	
JUMLAH ASET LAINNYA		26,563,239,087	29,516,961,719
JUMLAH ASET		1,224,540,797,397	1,610,544,930,339
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	738,923,724	144,198,073
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.1	423,040,333	
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	11,483,264,463	3,678,008,618
Pendapatan Yang Ditangguhkan	C.5.3	2,369,835,612	1,483,703
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		15,015,064,132	3,823,690,394
JUMLAH KEWAJIBAN		15,015,064,132	3,823,690,394
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	351,299,155	1,340,514
Cadangan Persediaan	C.6.2	534,233,212,363	632,375,797,484
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	(471,232,924)	-144,198,073
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.4	332,217,761	141,586,527
Barang / Jasa yang harus diterima	C.6.5	28,199,999	55,033,333
Barang/Jasa yang harus Diserahkan	C.6.6	(423,040,333)	0
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		534,050,656,021	632,429,559,785
EKUITAS DANA INVESTASI	C.7		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	648,911,838,157	944,773,377,927
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	26,563,239,087	29,518,302,233
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		675,475,077,244	974,291,680,160
JUMLAH EKUITAS DANA		1,209,525,733,265	1,606,721,239,945
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1,224,540,797,397	1,610,544,930,339

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan pembentukan Piutang Tak tertagih;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Formatted: Font: Arial, 14 pt, English (United Kingdom)

Formatted: Heading 1, Right

Formatted: Font: 8 pt, Not Bold, Font color: Blue

Formatted Table

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Auto, English (United Kingdom)

Formatted: Font: 8 pt, Swedish (Sweden)

Formatted: Font: Book Antiqua, Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Heading 3, Left, Right: 0", Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Widow/Orphan control, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Left: (No border)

Formatted: Font: Book Antiqua, 12 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Heading 3, Right: 0", Line spacing: single

Formatted: Font: 8 pt, Swedish (Sweden)

- 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
 15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
 19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
 21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-82/PB/2011 tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

A.2. KEBIJAKANTEKNIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (*human capital*) dan obyek (*human resources*) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (*life cycle approach*). Secara garis besar

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, No underline

Formatted: Font: 8 pt, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Book Antiqua, 12 pt, Bold, Underline, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Left, Indent: Left: 0", Hanging: 0.33"

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: 8 pt

Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: **Pertama** berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; **Kedua** berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; **Ketiga** adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan; **Keempat** adalah data dan informasi penduduk; **Kelima** adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Pembangunan Kependudukan merupakan program lintas sektor, oleh sebab itu penyerasian kebijakan antar bidang dan antar sektor harus menjadi perhatian bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertolak belakang. Sejak tidak adanya lembaga pemerintah yang menangani penyerasian kebijakan tersebut, banyak terjadi ketidakselarasan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah di Indonesia, termasuk dalam penyediaan dan peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan serta pengarahan mobilitas penduduk.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan **transisi demografi**. Transisi demografi tersebut ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian, dan disertai peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan. Selanjutnya kondisi tersebut menyebabkan angka ketergantungan menurun yang disebut dengan **bonus demografi**. Bonus demografi ini merupakan **jendela peluang** (*Window of Opportunity*) yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi atau jendela peluang tersebut diperkirakan akan terjadi hanya sekali saja dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar 5 tahun dari tahun 2028-2035 (Proyeksi Penduduk berdasarkan Sensus 2010), dengan syarat angka kelahiran dapat dikendalikan.

Oleh sebab itu melalui Pembangunan Kependudukan dan

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

KB(Pembangunan KKB), Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan peluang emas tersebut untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dapat terjadi apabila: (1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan untuk mendorong mereka memasuki pasar kerja sehingga dapat menambah tabungan keluarga.

Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga berencana (KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat memperlambat pertumbuhan dan pertumbuhan penduduk secara signifikan. Sejak Program KB Nasional dikembangkan tahun 1971 sampai dengan 2009, keberhasilannya diperkirakan telah mencegah lebih dari 100 juta kelahiran. Oleh karena itu, Program KB telah berhasil mengubah kondisi piramida penduduk Indonesia dari penduduk muda menuju penduduk dewasa.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkomitmen dengan Visi BKKBN adalah **"Penduduk Tumbuh Seimbang 2015"**. Visi tersebut mengacu kepada fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan Visi misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2010-2014. Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1. Namun, hasil SDKI 2012 menunjukkan beberapa hasil kinerja yang belum tercapai, maka kondisi "Penduduk Tumbuh Seimbang" tersebut diperkirakan akan tercapai pada tahun 2025, dengan strategi akselerasi yang lebih kuat dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Pembangunan

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah: **mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera**. Misi tersebut dilakukan melalui: penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; penetapan parameter penduduk; peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi; pengendalian penduduk dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta; mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk Menyelenggarakan Pembangunan Keluarga Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

[Pendekatan](#)
[Penyusunan](#)
[Laporan](#)
[Keuangan](#)

A.3.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2013 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BKKBN seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup BKKBN adalah 42 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 42 satker (100%).

Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

IV. IV. IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED/UNAUDITED)

▲
▲

Formatted: Font: (Default) Book Antiqua, 12 pt, Bold, Underline, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font color: Accent 5

Formatted: Left, Line spacing: 1.5 lines

Formatted Table

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
		KP		KD		DK		TP		
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
01	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	9	-	32	-	1	-	-	-	42

Keterangan:
M : Menyampaikan
TM : Tidak Menyampaikan

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Formatted: Font: Arial

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Formatted: Font: Book Antiqua, English (United States), Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Book Antiqua, English (United States), Not Superscript/ Subscript, Not Highlight

Formatted: Heading 3, Left, Line spacing: single

Formatted: Font: Book Antiqua, English (United States)

Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Arial, Swedish (Sweden), Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.01"

Formatted: Font: 8 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Light Blue, Not Superscript/

Formatted: Font color: Light Blue

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0.27", Hanging: 0.23", Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0.51" + Indent at: 0.76", No widow/orphan control

Formatted: Font: 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagai berikut:

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- pusat Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

Kebijakan Akuntansi atas

Belanja

- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kebijakan Akuntansi atas
Aset

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(4)(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Formatted: Font: 8 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Light Blue

Formatted: Font: 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 8 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 8 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Light Blue

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Aset Tetap

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian, terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, English (United States)

Formatted: Indent: Left: 0.5", Hanging: 0.03", Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: -0.25", Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1.03" + Indent at: 1.28"

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1.03" + Indent at: 1.28"

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Left: 0.5", Hanging: 0.03", Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: No underline, Indonesian

(2) /rampasan.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut;
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratusribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b-c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Font color: Light Blue

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Arial, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Piutang
Jangka
Panjang

Aset Lainnya

Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang, yang termasuk aset Lainnya adalah aset takberwujud, dan aset lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, No underline, English (United States)

Formatted: Font: No underline, Font color: Text 2

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

(3)(5) Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(4)(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- 1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: None, Indent: Left: 0.27", Hanging: 0.19", Space Before: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0.51" + Indent at: 0.76", Don't keep with next, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Left: (No border)

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Tabel. 4 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
------------------	--------	------------

Formatted: Centered

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Left: (No border)

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Left: (No border)

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Left: (No border)

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap

(5)7 Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 5 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan,Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat music modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp.
13.880.254.221,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 13.880.254.221,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

BKKBN tidak menetapkan estimasi pendapatan di tahun 2013, sehingga persentase realisasi terhadap estimasi pendapatan adalah 0%.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

No.	Akun	URAIAN	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	Rp -	Rp 50,548,960	0%
2	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 111,675,650	0%
3	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp -	Rp 572,675,800	0%
4	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp -	Rp 669,060,213	0%
5	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Rp -	Rp 55,837,932	0%
6	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp -	Rp 64,739,687	0%
7	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	Rp -	Rp 566,524,854	0%
8	423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	Rp -	Rp 10,764,955,297	0%
9	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	Rp -	Rp 9,977,328	0%
10	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	Rp -	Rp 422,505,093	0%
11	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	Rp -	Rp 43,325,457	0%
12	423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang berhak	Rp -	Rp 69,700,000	0%
13	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp 478,736,950	0%
	423999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp (9,000)	0%
		JUMLAH	Rp -	Rp 13,880,254,221	0%

Realisasi PNBP lainnya Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.868.139.061,- atau 1,3 persen dibandingkan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dikarenakan terdapat penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pengembalian sisa tunjangan kinerja pegawai TA 2012.

Tabel. 7 Perbandingan Realisasi PNBP Periode 1 Januari s/d 31 Des 2013 dan Periode 1 Januari s/d 31 Des 2013

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

No.	URAIAN	Periode 1 Jan s/d. 31 Des 2013	Periode 1 Jan s/d. 31 Des 2012	naik/ (Turun)	% Naik / Turun
1	Pendapatan Penjualan Lainnya	50,548,960	55,183,000	(4,634,040)	-8.40%
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	111,675,650	81,267,000	30,408,650	37.42%
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	572,675,800	271,846,050	300,829,750	110.66%
4	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	669,060,213	1,632,317,066	(963,256,853)	-59.01%
5	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	79,066,253	(79,066,253)	-100.00%
6	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	55,837,932	25,349,218	30,488,714	120.27%
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	64,739,687	207,275,477	(142,535,790)	-68.77%
8	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	566,524,854	292,031,597	274,493,257	93.99%
9	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	10,764,955,297	2,324,209,273	8,440,746,024	363.17%
10	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman LN TAYL	-	19,730,500	(19,730,500)	-100.00%
11	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahar	9,977,328	-	9,977,328	0.00%
11	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	422,505,093	187,181,730	235,323,363	125.72%
12	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	43,325,457	-	43,325,457	
13	Pendapatan Penyeteroran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang berhak	69,700,000	3,915,000	65,785,000	1680.33%
14	Pendapatan Anggaran Lain-lain	478,727,950	573,294,102	(94,566,152)	-16.50%
15	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen	-	450,000	(450,000)	-100.00%
16	Pendapatan Hibah LN-Terencana Multilateral	-	170,998,894	(170,998,894)	-100.00%
	Jumlah PNB	13,880,254,221	5,924,115,160	7,956,139,061	1.3

Rincian pendapatan per satker dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Penjualan lainnya(MAP 423119) pada satker KBKR sebesar Rp. 50.548.960,- berupa setoran sanggah banding dari PT. Bima Citra Sejati.
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin(MAP 423122) pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 49.660.650,- berupa setoran lelang sepeda motor dan mobil. Satker

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Rp. 61.415.000,- dan
Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Rp. 600.000,-

3. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (MAP 423753) pada satker KBKR sebesar Rp. 1.517.093, Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Rp. 44.707.657,- , satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Rp. 1.481.875,-, satker perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Rp. 17.033.062,-
4. Pendapatan pelunasan piutang non bendahara (MAP 423921) pada satker BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Penerimaan kembali persekot/Uang Muka Gaji (MAP 423991) pada satker BKKBN Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 43.325.457,-.
6. Pendapatan penyeteroran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak (MAP 423998) pada satker BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 69.700.000,-.
7. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya(MAP 423129) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423129	No	Satker	MAK 423129
1	SESTAMA	53,900,000	9	Sulawesi Utara	21,750,000
2	DI. Yogyakarta	95,030,800	10	Sulawesi Tengah	22,600,000
3	Jawa Timur	30,350,000	11	Maluku	6,700,000
4	Sumatera Barat	12,350,000	12	B a l i	33,300,000
5	R l a u	15,100,000	13	NTT	25,800,000
6	Jambi	30,445,000	14	Maluku Utara	13,600,000
7	Kalimantan Barat	140,650,000	15	BABEL	20,600,000
8	Kalimantan Selatan	50,500,000		TOTAL	572,675,800

8. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan(MAP 423141) pada beberapa satker berikut ini :

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

No	Satker	MAK 423141	No	Satker	MAK 423141
1	SESTAMA	549,868,180			
2	Jawa Barat	67,650	14	Kalimantan Tengah	835,053
3	Jawa Tengah	292,800	15	Kalimantan Selatan	625,000
4	DI. Yogyakarta	345,015	16	Kalimantan Timur	5,940,230
5	Jawa Timur	77,170,110	17	Sulawesi Utara	554,950
6	Aceh	105,000	18	Sulawesi Tengah	3,870,000
7	Sumatera Utara	666,000	19	Sulawesi Tenggara	4,000,606
8	Sumatera Barat	2,827,200	20	B a l i	2,864,400
9	R l a u	1,836,000	21	NTT	2,473,848
10	Jambi	1,236,564	22	Papua	1,993,548
11	Sumatera Selatan	434,916	23	Bengkulu	5,604,330
12	Lampung	1,612,377	24	Gorontalo	1,620,000
13	Kalimantan Barat	2,216,436		TOTAL	669,060,213

9. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL(MAP 423911) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423911	No	Satker	MAK 423911
1	SESTAMA	406,987,734			
2	Jawa Barat	32,346,772	16	Sulawesi Tengah	9,470,820
3	Jawa Tengah	5,785,561	17	Sulawesi Tenggara	4,020,000
4	DI. Yogyakarta	31,734,751	18	Maluku	164
5	Jawa Timur	15,565	19	B a l i	586,992
6	Aceh	126	20	NTB	370,740
7	Sumatera Utara	22,787,900	21	Papua	26,277,800
8	Sumatera Barat	370,000	22	Bengkulu	279
9	R l a u	747	23	Maluku Utara	180
10	Jambi	2,186,935	24	Banten	17
11	Lampung	220	25	BABEL	3,107,292
12	Kalimantan Barat	185,295	26	Gorontalo	13,823,018
13	Kalimantan Selatan	590	27	Kepulauan Riau	1,080,000
14	Kalimantan Timur	5,373,750	28	Papua Barat	10,921
15	Sulawesi Utara	685			566,524,854

10. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL(MAP 423913) pada beberapa satker berikut ini :

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

No	Satker	MAK 423913	No	Satker	MAK 423913
1	SESTAMA	8,616,017,232			
2	KBKR	579,661,435	15	Sulawesi Utara	14,663,000
3	KSPK	129,608,100	16	Sulawesi Selatan	144,853,450
4	DITVOK	65,508,114	17	Sulawesi Tenggara	5,629,250
5	PENDUK	165,129,500	18	Maluku	7,630,000
6	Jawa Tengah	154,447,991	19	NTT	110,346,742
7	Jawa Timur	19,191,056	20	Papua	345,600
8	Aceh	22,500,000	21	Maluku Utara	895,000
9	Sumatera Utara	150,000	22	Banten	14,370,000
10	Sumatera Barat	408,400	23	BABEL	2,820,000
11	Riau	339,500	24	Kepulauan Riau	611,000
12	Sumatera Selatan	174,583,407	25	Papua Barat	231,295,520
13	Kalimantan Selatan	299,151,000	26	Sulawesi Barat	1,280,000
14	Kalimantan Timur	3,520,000			10,764,955,297

11. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara (MAP 423922) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423922	No	Satker	MAK 423922
1	SESTAMA	169,122,000	9	Jambi	2,765,900
2	KBKR	12,000,000	10	Kalimantan Barat	1,350,000
3	PUSLITBANG	1,655,500	11	Sulawesi Utara	3,889,700
4	ADPIN	4,408,150	12	Sulawesi Selatan	17,849
5	DKI Jakarta	920,000	13	BABEL	1,000,000
6	Jawa Barat	2,800,000	14	Gorontalo	1,906,500
7	Aceh	8,000,000	15	Kepulauan Riau	50,507,300
8	Sumatera Utara	162,162,194			422,505,093

Realisasi Belanja
Rp.2.411.701.518.
255,-

B.2. Belanja

Realisasi belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Nasional pada Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 2.411.701.518.255,- atau sebesar 89,42 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 2.697.010.456.000,-. Anggaran dan realisasi belanja Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel. 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Periode 1 Jan s/d 31 Desember 2013

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Belanja	%
068.01.01	Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya BKKBN	173,519,097,000	146,913,134,068	84.67
068.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	6,300,000,000	6,143,157,900	97.51
068.01.04	Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN	41,670,796,000	38,428,534,840	92.22
068.01.06	Program Kependudukan dan KB	2,475,520,563,000	2,223,541,163,512	89.82
	Pengembalian Belanja	-	(3,324,472,065)	-
	JUMLAH	2,697,010,456,000	2,411,701,518,255	89.42

Berdasarkan Tabel 9, Realisasi Belanja lebih rendah dari anggarannya yang disebabkan antara lain :

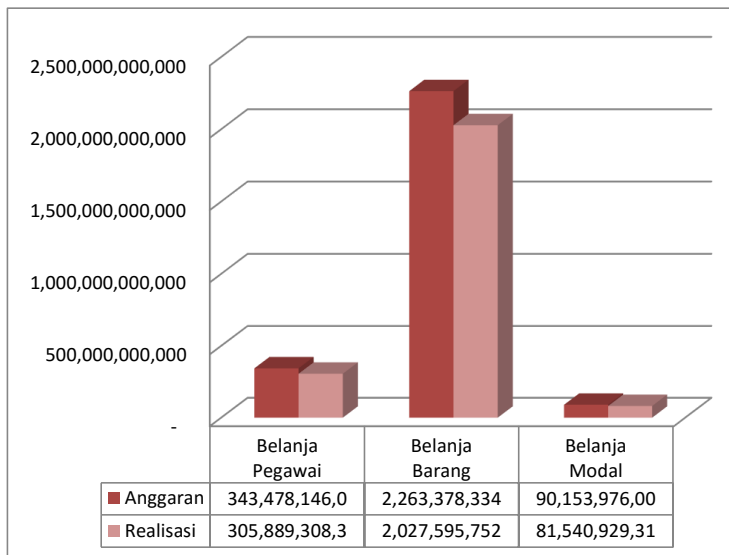
1. Terdapat mekanisme punishment dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang berdasarkan tingkat kehadiran pegawai;
2. Berdasarkan surat Plt. Sestama BKKBN nomor 2256/KU.002/B3/2013 tgl. 26 Agustus 2013 perihal Persiapan Revisi Akun Perjalanan Dinas, Seluruh satker di BKKBN diminta untuk mengusulkan revisiakun belanja perjalanan dinas menjadi belanja perjalanan dinas paket meeting bagi kegiatan perjalanan dinas yang belum dilaksanakan;
3. Pemotongan anggaran di beberapa satker untuk kontribusi penyediaan anggaran tunjangan kinerja tahun 2013;
4. BKKBN menerima penambahan pagu anggaran Direktif Presiden sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk Program Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2013 baru dapat direalisasikan di bulan November 2013 ;
5. Sesuai SP DIPA satker Deputi KBKR tanggal 20 Desember 2013

ada penambahan pagu UNFPA.

Tabel. 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	343.478.146.000	305.889.308.373	89,06
52	Belanja Barang	2.263.378.334.000	2.027.595.752.631	89,58
53	Belanja Modal	90.153.976.000	81.540.929.316	90,45
	Belanja Bruto	2.697.010.456.000	2.415.025.990.320	89,54
	Pengembalian Belanja	-	(3.324.472.065)	
	Belanja Netto	2.697.010.456.000	2.411.701.518.255	89,42

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 198.017.836.135,00 atau 8,95 persen dibandingkan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012. Perbandingan realisasi belanja periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini ;

Tabel. 10 Perbandingan Realisasi Belanja Periode 1 Jan s/d 31 Des 2013 dan Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Belanja Pegawai

Rp.
304.630.741.629,-

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
		Periode 1 Jan s/d 31 Des 2013	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012	Rp	%
51	Belanja Pegawai	304.630.741.629	333.162.648.174	(28.531.906.545,00)	(8,56)
52	Belanja Barang	2.025.531.562.764	1.806.774.668.733	218.756.894.031,00	12,11
53	Belanja Modal	81.539.213.862	73.746.365.213	7.792.848.649,00	10,57
	Jumlah	2.411.701.518.255	2.213.683.682.120	198.017.836.135,00	8,95

Catatan : Untuk belanja barang terdiri dari belanja barang rupiah murni, hibah dalam bentuk uang dan jasa.

B.2.1 Belanja Transaksi Kas

B.2.1.1 Belanja Pegawai

Commented [O1]: Pengertian belanja pegawai

Realisasi belanja pegawai Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp. 304.630.741.629,- dan Rp 333.162.648.174,-. Penurunan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 28.531.906.545,- atau minus 8,6 persen, dikarenakan pada tahun 2013 diberlakukan mekanisme punishment dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang berdasarkan tingkat kehadiran pegawai.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 11 Perbandingan Belanja Pegawai Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012

Uraian	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2013	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012	Naik/(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	132.211.800.125	129.387.589.090	2.824.211.035	2,2
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.621.390	2.404.149	217.241	9,0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	9.343.529.352	8.976.002.576	367.526.776	4,1
Belanja Tunj. Anak PNS	2.470.122.181	2.431.000.702	39.121.479	1,6
Belanja Tunj. Struktural PNS	11.589.410.000	12.101.130.000	(511.720.000)	(4,2)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.382.545.000	2.476.650.000	905.895.000	36,6
Belanja Tunj. PPh PNS	3.443.390.416	4.954.453.028	(1.511.062.612)	(30,5)
Belanja Tunj. Beras PNS	7.273.322.930	7.108.878.710	164.444.220	2,3
Belanja Uang Makan PNS	15.054.829.593	18.022.934.000	(2.968.104.407)	(16,5)
Belanja tunjangan khusus papua PNS	537.825.000	545.055.000	(7.230.000)	(1,3)
Belanja Tunj. Lain-lain PNS	82.809.000	96.864.900	(14.055.900)	(14,5)
Belanja Tunj. Umum PNS	4.801.835.000	5.356.710.000	(554.875.000)	(10,4)
Belanja Uang Lembur	-	2.093.464.000	(2.093.464.000)	(100,0)
Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Keg)	115.695.268.386	140.450.182.600	(24.754.914.214)	0,0
Realisasi Belanja Bruto	305.889.308.373	334.003.318.755	(28.114.010.382)	(8,4)
Pengembalian Belanja	(1.258.566.744)	(840.670.581)	(417.896.163)	49,7
Realisasi Belanja Netto	304.630.741.629	333.162.648.174	(28.531.906.545)	(8,6)

Belanja Barang

Rp.
2.005.997.299.271

,-

B.2.1.2 Belanja Barang

Commented [O2]: Ditambahkan pengertiannya

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Realisasi Belanja Barang Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah masing-masing sebesar Rp 2.005.997.299.271,00 (terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 1.983.643.372.314,00, hibah langsung dalam negeri sebesar Rp.17.384.700.000,00 dan hibah langsung luar negeri sebesar Rp.4.969.226.959,00) dan Rp 1.806.774.668.733,00 (terdiri dari rupiah murni sebesar Rp.1.791.002.022.302,00 dan hibah sebesar Rp.15.772.646.431,00). Kenaikan belanja barang sebesar Rp199.222.630.540,00 atau 11,03 persen. Kenaikan realisasi belanja barang tersebut antara lain disebabkan adanya :

1. Kenaikan pagu anggaran belanja BKKBN di bandingkan tahun sebelumnya;
2. Mendapat Hibah Langsung Dalam Negeri berupa uang sebesar Rp. 17.384.700.000,00 pada satker BKKBN Provinsi Jawa Barat;
3. Pada bulan November 2013 terdapat penambahan pagu anggaran Direktif Presiden untuk Program Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) di Perwakilan BKKBN Provinsi NTT sebesar Rp. 15.000.000.000,00.
4. Pada tanggal 20 Desember 2013 ada penambahan pagu UNFP menjadi Rp6.079.833.000,-

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Belanja Modal Rp.
81.539.213.862,-

Tabel. 12 Perbandingan Belanja Barang Periode 1 Januari s/d 31 Des 2013 dan Periode 1 Januari s/d 31 Des 2012

Nama Perkiraan	Realisasi Periode	Realisasi Periode	Naik/ (Turun)	% Naik / Turun
	1 Jan'13 sd. 31 Des 2013 (Rp.)	1 Jan'12 sd. 31 Des 2012 (Rp.)		
Belanja Barang Operasional	Rp 51.588.422.059	Rp 48.909.531.742	Rp 2.678.890.317	5,48%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 1.427.197.340.078	Rp 1.340.779.134.553	Rp 86.418.205.525	6,45%
Belanja Jasa	Rp 90.788.896.009	Rp 100.552.629.739	(9.763.733.730)	-9,71%
Belanja Pemeliharaan	Rp 30.718.070.683	Rp 27.440.828.925	Rp 3.277.241.758	11,94%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 404.013.711.636	Rp 287.883.818.705	Rp 116.129.892.931	40,34%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 2.133.089.775	Rp 2.036.091.235	Rp 96.998.540	4,76%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masy/pemda	Rp 723.254.000	Rp 198.270.250	Rp 524.983.750	0,00%
Belanja barang lainnya utk diserahkan pd masy/pemda	Rp 898.704.900	Rp 77.149.000	Rp 821.555.900	0,00%
Jumlah Belanja Bruto	Rp 2.008.061.489.140	Rp 1.807.877.454.149	Rp 200.184.034.991	11,07%
Pengembalian Belanja	(2.064.189.867)	(1.102.785.416)	(961.404.451)	87,18%
Jumlah Belanja Neto	Rp 2.005.997.299.273	Rp 1.806.774.668.733	Rp 199.222.630.540	11,03%

B.2.3 Belanja Modal

Commented [O3]: Ditambahkan pengertiannya

Realisasi belanja modal periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 81.539.213.862,- dan Rp 73.746.365.213,-. Kenaikan belanja modal sebesar Rp. 7.684.041.833,- atau 10,57 persen.

Kenaikan realisasi Belanja Modal tersebut antara lain disebabkan adanya:

1. Kenaikan pagu anggaran belanja BKKBN di bandingkan tahun sebelumnya;
2. Usulan satker provinsi untuk mengalokasikan renovasi gedung dan bangunan serta pembelian mobil operasional.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode 1 Januari s/d 31 Des 2013 dan Periode 1 Januari s/d 31 Des 2012

Nama Perkiraan	Realisasi Periode 1 Jan s/d 30 Juni 2013	Realisasi Periode 1 Jan s/d 30 Juni 2012	Naik/Turun	% Naik / Turun
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 64,322,353,004	Rp 50,640,061,230	Rp 13,682,291,774	27.02%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 15,865,168,322	Rp 21,186,250,503	(5,321,082,181)	-25.12%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaring	Rp 567,392,330	Rp 20,000,000	Rp 547,392,330	0.00%
Belanja Modal Lainnya	Rp 786,015,660	Rp 2,002,575,750	(1,216,560,090)	0.00%
Belanja Modal Tanah	-	Rp 8,000,000	(8,000,000)	
Jumlah Belanja Bruto	Rp 81,540,929,316	Rp 73,856,887,483	Rp 7,684,041,833	10.40%
Pengembalian Belanja	(1,715,454)	(110,522,270)		
Jumlah Belanja Neto	Rp 81,539,213,862	Rp 73,746,365,213	Rp 7,684,041,833	10.57%

B.2.2 Belanja Transaksi Non Kas

B.2.2.1 Belanja Barang

Realisasi belanja barang dengan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 19.534.263.491,00 dan Rp 0,00. Kenaikan belanja barang sebesar Rp. 19.534.263.491,00.

BKKBN mendapatkan bantuan hibah langsung luar negeri dari UNFPA. Hibah dalam bentuk jasa ini merupakan bagian dari komitmen hibah dengan register 71509501. Dokumentasi terkait hibah jasa ini berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) antara UNFPA Representative

Commented [O4]: Pengertian belanja pegawai

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

dengan Kepala Biro Perencanaan yang disertai dengan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan beserta nilainya. Nilai hibah dalam bentuk jasa yang diserahkan seluruhnya sebesar Rp.19.534.263.491,00 atau setara dengan USD1,883,691 sebagai berikut:

1. BAST tanggal 31 Januari 2013 tentang hibah jasa senilai Rp.12.861.036.963,00 atau setara dengan USD1,336,212;
2. BAST tanggal 31 Desember 2013 tentang hibah jasa senilai Rp.6.673.226.528,00 atau setara dengan USD547,479.

BKKBN telah mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) kepada KPPN dengan nomor pengesahan sebagai berikut :

1. MPHL Nomor 01041/649505/E3/13 dan Persetujuan Nomor 326535H senilai Rp.12.861.036.963,00 tanggal 31 Desember 2013;
2. MPHL Nomor 01042/649505/E3/13 dan Persetujuan Nomor 326536H senilai Rp. 6.673.,226.528,00 tanggal 31 Desember 2013

Hibah langsung luar negeri dalam bentuk jasa ini tidak dapat dicatat dalam revisi pagu DIPA BKKBN dikarenakan hibah tersebut bukan dalam bentuk uang.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Pendapatan

~~PENDAPATAN <KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGANAMA SATKER>
/((Diisi dengan nilai realisasi pendapatan dan diuraikan per jenis
pendapatan: pendapatan pajak (khusus Departemen
Kementerian Keuangan), pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah.
Nilai realisasi pendapatan dibandingkan dengan nilai realisasi
pendapatan periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Uraikan juga
penyebab kenaikan/penurunan realisasi pendapatan tersebut)))~~

Formatted: Font: 8 pt, Not Bold, No underline

Formatted Table

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indent: Left: 0", Widow/Orphan control, Keep with next

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp.549.043.045.699,- dan Rp.636.253.250.179,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel. 14 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012

No.	Aset Lancar	Per 31 Des 2013	Per 31 Des 2012
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 11.460.590.009	Rp 3.678.008.618
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 6.253	Rp 6.253
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 2.969.737.920	Rp 143.063.977
4	Belanja Dibayar di Muka	Rp 28.199.999	Rp 55.033.333
5	Bag Lancar Tagihan TP/TGR	Rp 351.299.155	Rp 1.340.514
7	Persediaan	Rp 534.233.212.363	Rp 632.375.797.484
	Jumlah	Rp 549.043.045.699	Rp 636.253.250.179

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2013 dan per 31

Aset Lancar
Rp.549.043.045.699,-.

Kas di Bendahara

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Pengeluaran
Rp.11.483.264.463,-

Desember 2012 masing-masing sebesar Rp.11.483.264.463,- dan Rp.3.678.008.618,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel. 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja per 31 Des 2013

No	Uraian Satuan Kerja	Per 31 Desember 2013	Per 31 Desember 2012	Kenaikan/Penurunan
1.	SESTAMA	Rp 10,212,550	Rp 884,219,650	Rp (874,007,100)
2.	ADPIN	-	Rp 223,313,515	Rp (223,313,515)
3.	KBKR	Rp 3,743,317,317	Rp 406,179,796	Rp 3,337,137,521
4.	LATBANG	Rp 656,266,718	Rp 258,948,266	Rp 397,318,452
5.	IRTAMA	Rp 118,662,400	Rp 30,292,500	Rp 88,369,900
6.	DITVOKKOM	Rp 5,719,421,530	Rp 1,344,547,642	Rp 4,374,873,888
7.	PUSLITBANG	Rp 101,692,688	Rp 238,761,430	Rp (137,068,742)
8.	KEPENDUDUKAN	Rp 360,295,693	Rp 90,555,319	Rp 269,740,374
9.	JAMBI	Rp 2,480,050	Rp -	Rp 2,480,050
10.	KALBAR	-	Rp -	Rp -
11.	KALTIM	Rp 172,444,630	Rp -	Rp 172,444,630
12.	SULTRA	Rp 598,470,887	Rp 47,690,500	Rp 550,780,387
13.	GORONTALO	-	Rp 153,500,000	Rp (153,500,000)
	Total	Rp 11,483,264,463	Rp 3,678,008,618	Rp 7,805,255,845

Terdapat beberapa Satuan Kerja yang belum menyetorkan saldo Kas di Bendahara pengeluaran tersebut ke rekening Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 16 Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

No	Uraian Satuan Kerja	Saldo per 31 Desember 2013	Penyetoran di bulan Januari 2014	Saldo
1.	SESTAMA	Rp 10,212,550	Rp (10,212,550)	Rp -
2	KBKR	Rp 3,743,317,317	Rp (3,743,317,317)	Rp -
3	LATBANG	Rp 656,266,718	Rp (656,266,718)	Rp -
4	IRTAMA	Rp 118,662,400	Rp (118,662,400)	Rp -
5	DITVOKKOM	Rp 5,719,421,530	Rp (5,719,421,530)	Rp -
6	PUSLITBANG	Rp 101,692,688	Rp (101,692,688)	Rp -
7	KEPENDUDUKAN	Rp 360,295,693	Rp (360,295,693)	Rp -
8	JAMBI	Rp 2,480,050	Rp (2,480,050)	Rp -
9	KALTIM	Rp 172,444,630	Rp (172,444,630)	Rp -
10	SULTRA	Rp 598,470,887	Rp (598,470,887)	Rp -
Jumlah		Rp 11,483,264,463	Rp (11,483,264,463)	-

Kas di Bendahara
Penerima Rp.6.253,-

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar Rp6.253,- dan Rp6.253,- yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan lingkup per Eselon I tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel. 17 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Satuan Kerja per 31 Des 2013

No	Uraian Satuan Kerja	Per 31 Desember 2013	Per 31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan
1.	Sekretariat Utama	Rp 6,253	Rp 6,253	0
Total		Rp 6,253	Rp 6,253	0

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut keseluruhannya belum disetor ke rekening Kas Negara, sehingga tidak ada perubahan dengan tahun anggaran yang lalu. Sisa tersebut tidak disetorkan supaya rekening bendahara penerima tidak ditutup.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp.2.969.737.920,-

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Saldo Kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp.2.969.737.920,- dan Rp.143.063.977,- yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian kas lainnya dan setara kas tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel. 18 Rincian Penyetoran Kas di Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013

No	Uraian Satuan Kerja	Saldo per 31 Desember 2013	Saldo per 31 Desember 2012
1	KBKR	Rp 364,717,761	Rp 141,586,527
2	Sekretariat Utama	Rp 2,105,054,704	
3	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakkan dan Informasi	Rp 44,774,316	
4	Direktorat Advokasi dan KIE	Rp 25,394,440	
5	Puslitbang KB-KR	Rp 38,197,442	
6	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	Rp 99,004,100	
7	Perwakilan BKKBN Prov. DI. Yogyakarta	Rp 235,190,800	Rp 1,477,450
8	Perwakilan BKKBN Prov. Jabar	Rp 57,404,357	
	Jumlah	Rp 2,969,737,920	Rp 143,063,977

Saldo Kas lainnya dan setara kas per **31 Desember 2013** tersebut diatas berasal dari :

- 1) Saldo kas lainnya dan setara kas pada Satker Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebesar Rp.364.717.761,- merupakan koreksi BPK atas rekening hibah UNFPA yang terdiri dari saldo rekening koran per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 362.994.676,- dan cash on hand sebesar Rp. 1.723.085,- . Pada saldo rekening koran per 31 Desember 2013 tersebut masih terdapat anggaran untuk kegiatan yang tercatat di tahun 2013 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2014 sebesar Rp. 32.500.000,-.
- 2) Saldo kas lainnya dan setara kas pada Satker Sekretariat Utama sebesar Rp.2.105.054.704,- merupakan koreksi BPK yang terdiri dari pengembalian tunjangan kinerja, belanja bahan, perjalanan dinas, honor dan uang makan sebesar Rp.2.101.826.404,- serta jasa giro rekening BKKBN-UNFPA CP 8 pada Bank BNI Cabang Tebet Nomor 0106415870 sebesar Rp.3.228.300,-
- 3) Saldo kas lainnya dan setara kas pada Satker Deputi Bidang Advokasi, Penggerakkan dan Informasi sebesar Rp.44.774.316 merupakan koreksi BPK atas pengembalian LS tidak terpakai dan perjalanan dinas;
- 4) Saldo kas lainnya dan setara kas pada Satker Direktorat Advokasi dan KIE sebesar Rp.25.394.440,- merupakan koreksi BPK atas jasa giro yang

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

- disetorkan melewati Tahun Anggaran 2013 dan belum dicatat pada Neraca Unaudited;
- 5) Saldo kas lainnya dan setara kas pada Satker Pusat Penelitian dan Pengembangan KB-KR sebesar Rp.38.197.442,- merupakan koreksi BPK yang terdiri dari pengembalian perjalanan dinas TA 2013 yang disetor di 2014 Rp.23.604.800,- dan atas jasa giro yang disetorkan melewati Tahun Anggaran 2013 dan belum dicatat pada Neraca Unaudited Rp.14.592.642,-;
 - 6) Saldo kas lainnya dan setara kas pada Perwakilan BKKBN Provinsi DI. Yogyakarta sebesar Rp.235.190.800,- merupakan Tunjangan Kinerja Pegawai yang belum dibayarkan dan masih ada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2013. Tunjangan Kinerja tersebut telah dibayarkan kepada pegawai pada bulan Januari 2014 sebesar Rp.228.624.376,- (tanda terima pembayaran tunjangan kinerja terlampir) dan sisanya sebesar Rp.6.566.424,- telah dikembalikan ke Kas Negara pada tanggal 21 Januari 2014 dengan NTPN No.1208080311010814 (terlampir). Sisa tunjangan kinerja tersebut sebenarnya merupakan pengembalian belanja pada tahun anggaran 2013, namun karena terdapat salah perhitungan tunjangan kinerja dan sisa tersebut baru disetor pada Januari 2014 maka mata anggaran yang digunakan saat penyetoran adalah mata anggaran pendapatan pengembalian belanja TAYL.
 - 7) Saldo kas lainnya dan setara kas pada satker Deputi Bidang Pengendalian Penduduk sebesar Rp. 99.004.100,- merupakan koreksi BPK atas Pengembalian perjalanan dinas.
 - 8) Saldo kas lainnya dan setara kas pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat merupakan koreksi BPK sebesar Rp. 57.404.357,- yang terdiri dari sisa kegiatan operasional pos KB Rp. 1.200.000,- dan jasa giro bank sebesar Rp. 56.204.357,-.

Belanja Dibayar Dimuka
(Prepaid)
Rp.28.199.999,-

C.1.4 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Kas pada Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp. 28.199.999,- dan Rp.55.033.333,- yang merupakan pengeluaran belanja Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan atas pekerjaan/jasa dan telah dibayarkan pada awal perikatan dari Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran serta membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum sepenuhnya diterima/dinikmati satuan kerja.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2013 terdapat Satuan Kerja pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 19 Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2013

No	Jenis	T.A. 2013	T.A. 2012
1	Pembayaran Sewa Sekretariat PPKS	15.200.000	7.200.000
2	Pembayaran Sewa Rumah Dinas Pejabat Eselon II	9.999.999	-
3	Pembayaran Sewa Rumah Dinas Pejabat Dinas Eselon III	3.000.000	-
4	Pembayaran Sewa Gudang Alkon	-	7.500.000
5	Pembayaran Sewa Space Iklan (Billboard)	-	40.333.333
Jumlah		28.199.999	55.033.333

Bagian Lancar TP TGR
Rp.353.064.478,-

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp.353.064.478,- dan Rp.1.347.250,- yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel. 20 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Utama	Rp 50.000.000
2	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan	Rp 1.344.500
3	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Utara	Rp 301.719.978
Jumlah		Rp 353.064.478

Sedangkan mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Saldo per 31 Desember 2012	Rp 1.347.250
Mutasi tambah:	
- Bagian Lancar TGR pada Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat (reklasifikasi piutang jangka panjang menjadi piutang jangka pendek/bagian lancar)	Rp 1.347.250
- Bagian Lancar TGR pada Sekretariat Utama	Rp 50.000.000
- Bagian Lancar TGR pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	Rp 301.719.978
Mutasi kurang:	-
- Bagian Lancar TGR pada Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Barat	(1.350.000)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp 353.064.478

Mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan SK Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat No.270/KU.702/J/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ditetapkan bahwa telah terjadi kehilangan Barang Milik Negara berupa sebuah Laptop Merk Axioo (pembelian tahun 2008) pada tanggal 21 Desember 2009 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian nomor STPL/701/B-1/XII/2009 yang menjadi tanggung jawab Sdri. Iriyani, SE. Atas kehilangan BMN tersebut telah diterbitkan SK No.270/KU.702/J/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Perihal Penetapan Nilai Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp.4.694.500,-.

Menunjuk pada surat pernyataan sanggup membayar TGR atas kehilangan Laptop tersebut, telah dinyatakan bahwa Sdri. Iriyani, SE sanggup membayar TGR sebesar Rp.4.694.500,- dengan cara menyeter tunai ke Kas Negara sebesar Rp.2.000.000,- pada tanggal 28-11-2012 dengan NTPN No. 1010150001081203. Sedangkan sisanya diangsur selama 24 bulan melalui pemotongan gaji pada pembuat daftar gaji mulai Januari 2013 sd. Desember 2014.

Sisa piutang TGR per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.694.500,- dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu :

- a. cicilan piutang pada periode Januari sd. Desember 2013 sebesar Rp.1.347.250,- merupakan piutang jangka pendek (bagian lancar tagihan TGR); dan
- b. cicilan piutang pada periode Januari sd. Desember 2014 sebesar Rp.1.347.250,- merupakan piutang jangka panjang lainnya (telah dijelaskan pada butir C.3.1 dan C.3.2)

Selama periode 1 Januari 2013 sd. 31 Desember 2013 Sdri. Iriyani, SE

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

telah menyetor sebesar Rp.1.350.000,-, sehingga secara keseluruhan terdapat sisa piutang sebesar Rp.1.344.500,- (Rp.2.694.500 – Rp.1.350.000).

Sisa piutang TGR per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.344.500,- yang awalnya merupakan piutang jangka panjang, telah direklasifikasi menjadi piutang jangka pendek (bagian lancar tagihan TGR).

2. Piutang TGR pada Satker Sestama sebesar Rp.50.000.000,- merupakan sisa piutang TGR atas kehilangan 1 unit kendaraan dinas roda empat berupa Toyota Kijang KF80 Long STD Tahun 2004 dengan nilai penetapan ganti rugi sebesar Rp.76.000.000,- sesuai SKTJM atas nama Salbani tanggal 1481/I/KU.403/B3/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan jatuh tempo penyelesaian pada Juli 2014. Sampai dengan 31 Desember 2013 atas piutang tersebut telah dilakukan penyetoran yaitu sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 23-10-2013 NTPN No. 1311021315011511 dan sebesar RP.16.000.000,- tanggal 21-11-2-13 NTPN No.1305071107140303.
3. Piutang TGR pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara merupakan piutang atas penggelapan pajak (fiktif) dengan nilai penetapan TGR sebesar Rp. 352.898.638,- berdasarkan SKTJM an. Adolfina Mamarodia No. 294/KU.403/J/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan jatuh tempo piutang per November 2014. Sampai dengan 31 Desember 2013 atas piutang tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp.51.178.660,- melalui pemotongan gaji setiap bulan dan pemotongan remunerasi.

C.1.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar minus Rp 1.765.323,- dan Rp6.736,- yang merupakan estimasi atas tak tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk debitor yang tersebut

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Bag. Lancar
TP/TGR minus
Rp.1.765.323,-

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

pada tabel dibawah ini:

Tabel 21 Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013

No	Kualitas	Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	Sekretariat Utama	50.000.000	-0,50%	(250.000)
2	Lancar	Perwakilan BKKBN Prov Kalbar	1.344.500	-0,50%	(6.723)
3	Lancar	Perwakilan BKKBN Prov. Sulut	301.719.978	-0,50%	(1.508.600)
Pembulatan					(1)
Total			353.064.478		(1.765.323)

Persediaan
Rp.534.233.212.363,-

C.1.7 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar Rp.534.233.212.363,- dan Rp.632.375.797.484,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel. 22 Rincian Persediaan per 31 Desember 2013

No. Akun	Uraian	Per 31 Desember 2013	Per 31 Desember 2012
1	Barang Konsumsi	Rp 1.689.364.211	Rp 1.489.616.758
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 39.871.500	Rp 39.765.000
3	Suku Cadang	Rp 1.961.071.288	Rp 742.261.846
4	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp 11.388.292.472	Rp 12.952.519.536
5	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 52.008.000	Rp 39.924.500
6	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 89.660.862	Rp 39.600.000
7	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada	Rp 476.641.033.491	Rp 565.043.155.547
8	Bahan Baku	Rp 687.500	Rp 260.000
9	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	Rp 353.325.000	Rp 352.250.280
10	Persediaan Lainnya	Rp 42.017.898.039	Rp 51.676.444.017
Jumlah		Rp 534.233.212.363	Rp 632.375.797.484

Aset Tetap Rp.
648.911.838.157,-

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.648.911.838.157,- dan Rp.944.773.377.927,- yang merupakan aset

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel. 23 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2013

No.	Uraian	Per 31 Desember 2013	Per 31 Desember 2012
1	Tanah	Rp 368.802.024.366	Rp 366.783.710.993
2	Peralatan dan Mesin	Rp 353.804.920.192	Rp 298.558.585.479
3	Gedung dan Bangunan	Rp 255.705.326.222	Rp 239.433.632.412
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 22.224.046.832	Rp 17.278.957.020
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 4.263.911.292	Rp 4.153.389.332
6	KDP	Rp 11.967.763.000	Rp 18.565.102.691
	Jumlah	Rp 1.016.767.991.904	Rp 944.773.377.927
	Akumulasi Penyusutan	(367.856.153.747)	-
	Nilai Buku Aset Tetap	648.911.838.157	Rp 944.773.377.927

C.2.1 Tanah

Tanah
Rp.368.802.024.366,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp.368.802.024.366,- dan Rp.366.783.710.993,-.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 disajikan dalam lampiran.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 24 Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah per 31 Desember 2013

Saldo per 31 Desember 2012	Rp 366.783.710.993
Mutasi tambah:	
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp 64.710.000
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp 1.843.313.373
- Pengembangan Nilai Aset	Rp 172.550.000
Mutasi kurang:	
- Koreksi Pencatatan Nilai	(62.260.000)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp 368.802.024.366

Transaksi penambahan tersebut adalah berupa:

Transaksi Penambahan :

- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat senilai Rp.1.843.313.373,-;
- Pengembangan Nilai Aset pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.172.550.000,-;
- Koreksi Pencatatan Nilai pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi senilai Rp.2.450.000,-.

Transaksi penambahan dan pengurangan asset Tanah per satker per 31 Desember 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	SATKER	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG
		PENGEMBANGAN NILAI ASET	KOREKSI NILAI TIM PENERTIBAN ASET	KOREKSI PENCATATAN NILAI	KOREKSI PENCATATAN NILAI
1	JAWA TENGAH	172.550.000	-	-	-
2	SUMATERA BARAT	-	1.843.313.373	-	-
3	J A M B I	-	-	2.450.000	-
4	GORONTALO	-	-	62.260.000	(62.260.000)
	TOTAL	172.550.000	1.843.313.373	64.710.000	(62.260.000)

Peralatan dan Mesin Rp.
353.804.920.192,-

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah Rp.353.761.175.771,- dan Rp.298.558.585.479,-. Sedangkan nilai buku peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.112.737.035.096,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.241.067.885.096,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesintersebutdapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 25 Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Saldo per 31 Desember 2012	Rp 298.558.585.479
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp 52.914.719.241
- Penambahan Saldo Awal	Rp 457.121.400
- Hibah Masuk	Rp 178.849.000
- Transfer Masuk	Rp 3.776.259.427
- Penyelesaian dengan KDP	Rp 4.197.572.372
- Reklasifikasi Masuk	Rp 3.817.387.470
- Perolehan Lainnya	Rp 20.000.000
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp 44.986.742
- Pengembangan Nilai Aset	Rp 18.860.000
- Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas	Rp 5.717.857
- Normalisasi Aset	Rp 538.114.146
Mutasi kurang:	
- Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas	(1.715.454)
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	(14.591.642)
- Normalisasi Aset	(181.791.855)
- Penghapusan	(152.326.528)
- Transfer Keluar	(4.232.094.724)
- Reklasifikasi Keluar	(3.784.638.073)
- Koreksi Pencatatan	(25.592.000)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(2.330.502.666)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp 353.804.920.192
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013	(241.067.885.096)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	Rp 112.737.035.096

Transaksi penambahan peralatan dan mesin per satker dapat dijelaskan sebagai berikut :

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

NO.	SATUAN KERJA	SALDO AWAL (100)	PEMBELIAN (101)	TRANSFER MASUK (102)	HIBAH MASUK (103)	PENYELESAIAN DGN KDP (105)	REKLAS MASUK (107)	PEROLEHAN LAINNYA (112)	REKLAS DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP (177)	PENGELOMPOKAN NILAI ASET (202)	KOREKSI NILAI KUANITITAS (204)	TRANSAKSI NORMALISASI BMN ASET TETAP (209)
1	SESTAMA	10.500.000	10.208.177.362	47.294.074		4.197.572.372	312.698.000					10.500.000
2	IRTAMA			304.717.800			2.640.000					
3	KBKR			158.236.100	178.849.000		70.510.000					8.500.000
4	KSPK		197.936.000	158.236.100			37.837.500					
5	LATBRANG		124.750.000	118.950.700								1.581.745
6	DITVOK		13.937.302.990	124.718.000			468.018.500					
7	PUSLUTBANG KB-KR		238.786.000	272.784.167			24.450.000					
8	ADPIN		676.127.222	460.870.300			233.941.722					
9	DALDUK		132.246.700	167.986.067								
10	JABAR	11.214.500	2.164.974.640	38.470.883			45.730.500		142		97.857	
11	JATENG	5.947.000	1.285.770.519	40.554.125			79.698.000					
12	DIY		1.480.132.000	102.266.661			24.320.000			4.800.000		10.000
13	JATIM	55.010.000	1.155.240.400	40.554.125			175.186.700					
14	ACEH	158.110.000	1.219.878.000	66.841.589			68.705.616					242.771.000
15	SUMUT	23.500	671.469.800	103.366.661			171.606.000					
16	SUMBAR		636.281.000	66.841.589			25.652.000					
17	RIAU	3.014.000	881.018.500	103.366.661			62.236.250					
18	JAMBI	48.788.400	739.544.450	268.378.745			131.642.000			14.060.000	2.870.000	48.151.800
19	SUMSEL	26.455.000	965.131.000	85.104.125								11.327.000
20	LAMPUNG		507.624.700	23.391.589			132.400.000					
21	KALBAR		915.778.500	67.116.589				20.000.000	16.397.600			380.000
22	KALTENG	23.500.000	1.025.015.000	85.379.125			7.200.000					1.000.000
23	KALSEL		615.643.850	103.841.661								
24	KALTIM	12.000	704.586.000	23.666.589			135.470.200		100.000			1.128.001
25	SULUT		947.165.200	24.491.589			218.993.400					
26	SULTENG		703.363.000	24.491.589			192.797.000					47.799.000
27	SULSEL		638.870.000	77.072.857			21.120.000					56.000
28	SULTRA		986.307.378	24.491.589								
29	MALUKU		913.462.000	25.041.589			66.500.000					
30	BAU		878.289.500	103.366.661								
31	NTB	58.877.000	910.612.600	103.366.661			33.375.000					119.909.600
32	NTT		601.800.000	23.391.589			2.180.000		20.012.000			
33	PAPUA		1.088.787.860	25.041.589			50.233.210					
34	BENGKULU		997.435.000	66.841.589			31.654.000					
35	MALUT		402.670.000	25.041.589			100.697.800					
36	BANTEN		302.994.120	57.708.256			84.581.800				2.750.000	
37	BABEL		74.985.000	65.822.089			11.848.000					
38	GORONTALO	9.670.000	406.247.750	24.491.589			221.843.000					
39	KEPRI		645.235.000	23.391.589			51.035.000		8.477.000			
40	PAPUA BARAT	45.000.000	1.137.100.000	25.041.589			499.017.272					45.000.000
41	SULBAR		795.000.000	24.491.589			20.500.000					
	JUMLAH	457.121.400	52.914.719.241	3.776.298.427	178.849.000	4.197.572.372	3.817.387.470	20.000.000	44.986.742	18.860.000	5.717.857	538.114.145

Transaksi pengurangan peralatan dan mesin per satker dapat dijelaskan sebagai berikut:

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

NO.	SATUAN KERJA	KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS (204)	KOREKSI NILAI TIM PENERTIBAN ASET (205)	TRANSAKSI NORMALISASI BMN ASET TETAP (209)	PENGHAPUSAN (301)	TRANSFER KELUAR (302)	REKLAS KELUAR (304)	KOREKSI PENCATATAN (305)	PENGHENTIAN ASET DR PENGUNAAN (401)
1	SESTAMA				(80.000.000)	(3.510.848.060)	(321.310.000)		(302.720.000)
2	IRTAMA						(2.640.000)		
3	KBKR						(70.510.000)	(12.750.000)	(18.040.000)
4	KSPK						(37.837.500)		
5	DITVOK					(637.501.656)	(468.018.500)		
6	PUSLITBANG						(24.490.000)		
7	ADPIN					(72.901.868)	(256.941.722)		
8	JABAR			(1)			(84.588.000)		(208.582.468)
9	JATENG			(5.947.000)			(79.668.000)		
10	DIY						(24.320.000)		(74.000.000)
11	JATIM			(148.562.854)			(149.502.700)	(12.842.000)	
12	ACEH						(69.705.616)		(8.000.000)
13	SUMUT						(171.605.000)		
14	SUMBAR				(65.002.000)		(25.340.000)		
15	RIAU			(1.365.000)			(62.236.250)		(3.014.000)
16	JAMBI				(251.000)		(131.642.000)		(92.630.300)
17	SUMSEL								(111.255.000)
18	LAMPUNG			(16.247.000)			(115.397.000)		
19	KALBAR		(14.591.642)		(100.000)				(283.215.590)
20	KALTENG						(7.200.103)		(60.000.046)
21	KALSEL								(82.769.000)
22	KALTIM						(135.470.200)		(158.298.685)
23	SULUT						(183.733.400)		(35.260.000)
24	SULTENG						(167.837.000)		(24.960.000)
25	SULSEL				(5.145.000)		(21.120.000)		(29.256.500)
26	SULTRA				(1.828.528)				
27	MALUKU						(66.500.000)		(50.823.857)
28	NTB						(33.375.000)		
29	NTT						(2.180.000)		
30	PAPUA						(50.233.210)		(72.838.600)
31	BENGKULU						(31.654.000)		
32	MALUT						(100.697.800)		
33	BANTEN						(84.581.800)		
34	BABEL						(11.848.000)		
35	GORONTALO			(9.670.000)			(221.843.000)		
36	KEPRI						(51.095.000)		(169.838.600)
37	PAPUA BARAT					(10.843.140)	(499.017.272)		(45.000.000)
38	SULBAR	(1.715.454)					(20.500.000)		
	JUMLAH	(1.715.454)	(14.591.642)	(181.791.855)	(152.326.528)	(4.232.094.724)	(3.784.638.073)	(25.592.000)	(2.330.502.668)

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sd. 31 Desember

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

2013 :

No.	Uraian Peruntukan Peralatan Mesin	Mata Anggaran Belanja Modal yang Digunakan					Jumlah peruntukkan peralatan mesin	
		532111	532112	533111	536111	523119		523121
PERALATAN & MESIN								
1.	Pembelian Peralatan Mesin	52.266.543.420	15.000.000	27.738.000	148.306.400	49.054.000	384.029.421	52.890.671.241
2.	Pengembangan Nilai Aset	16.410.000	-	2.450.000	-	-	-	18.860.000
3.	Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	4.197.572.372	-	-	-	-	-	4.197.572.372
4.	Ekstrakomple	271.400.343	-	-	19.294.000	-	-	290.694.343
5.	Honor Tenaga Ahli	58.970.000	-	-	-	-	-	58.970.000
6.	Kembali Belanja Modal	(1.715.454)	-	-	-	-	-	(1.715.454)
SELAIN PERALATAN & MESIN :								
7.	pembelian (jaringan)	2.938.529.521	-	-	-	-	-	2.938.529.521
8.	pembelian (ATL)	62.219.999	-	-	-	-	-	62.219.999
9.	pembelian (Software)	232.180.000	-	-	-	-	-	232.180.000
10.	pembelian (Lisensi)	3.016.455.000	-	-	-	-	-	3.016.455.000
11.	Penyelesaian Pembangunan dgn KDP (Jaringan)	950.911.749	-	-	-	-	-	950.911.749
12.	Penyelesaian Pembangunan dgn KDP (Software)	139.652.700	-	-	-	-	-	139.652.700
13.	Ekstrakom-Gedung Bangunan	5.615.500	-	-	-	-	-	5.615.500
14.	Pengembangan Nilai Aset Software	1.200.000	-	-	-	-	-	1.200.000
15.	pengembangan nilai aset gedung & bangunan	149.692.400	-	-	-	-	-	149.692.400
JUMLAH BELANJA MODAL		64.305.637.550	15.000.000	30.188.000	167.600.400	49.054.000	384.029.421	64.951.509.371

tabel "Rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal" diatas dibandingkan dengan tabel transaksi penambahan peralatan dan mesin per satker pada kolom/baris Pembelian Peralatan Mesin terdapat selisih (Rp.52.890.671.241 – Rp.52.914.719.241) sebesar Rp.24.048.000,-.

Selisih tersebut disebabkan karena Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi kelebihan dalam menginput nilai SP2D Nomor 097651D sebesar Rp.187.548.000,-, yang dicatat menjadi sebesar Rp.211.596.000,- dalam aplikasi SIMAK BMN, sehingga terjadi selisih sebesar Rp.24.048.000,- dan belum dilakukan koreksi.

Perolehan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sd. 31 Desember 2013 terdiri dari penggunaan MAK 532, 533, 536 dan MAK 523 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111) senilai Rp.64.305.637.550,-;
2. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin (MAK 532112) senilai Rp.15.000.000,-;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (MAK 533111) senilai

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Rp.30.188.000,-;

4. Belanja Modal Lainnya (MAK 536111) senilai Rp.167.600.400,-; dan
5. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (MAK 523121) senilai Rp.384.029.421,-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan peruntukannya, yaitu :

1. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.27.738.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menggunakan Belanja Modal MAK 533111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 532111;
2. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.148.306.400,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung menggunakan Belanja Modal MAK 536111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 532111;
3. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.290.000.000,- pada Satuan Kerja Deputi Bidang Advokasi, Penggerakkan dan Informasi menggunakan Belanja Pemeliharaan MAK 523121, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 532111. Selain itu, berdasarkan temuan pemeriksaan BPK terdapat belanja MAK 523121 yang digunakan untuk Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.94.029.421,- dan nilai tersebut sudah dikapitalisasi dalam peralatan dan mesin;
4. Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp.49.054.000,- pada Satuan Kerja perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur merupakan Temuan Pemeriksaan BPK yang menggunakan belanja MAK 523119 dan seharusnya menggunakan belanja MAK 532111;
5. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp.2.450.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menggunakan Belanja Modal MAK 533111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 532121;
6. Pembelian Aset Ekstrakomtable sebesar Rp.19.294.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung menggunakan Belanja Modal MAK 536111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 532111.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Nilai perolehan gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah Rp.255.705.326.222,- dan Rp.239.433.632.412,-. Sedangkan nilai buku gedung dan bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.134.951.126.880,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.120.754.199.342,-.

Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 26 Penambahan dan Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	239.433.632.412
Mutasi Tambah :		
- Penambahan Saldo Awal	Rp	15.100.000
- Pembelian	Rp	227.687.665
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	8.914.811.388
- Reklasifikasi Masuk	Rp	187.551.800
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	26.502.435
- Pengembangan nilai aset	Rp	5.892.956.422
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	824.700.000
- Pengembangan melalui KDP	Rp	1.919.646.200
- Normalisasi Aset	Rp	11.857.700
Mutasi Kurang :		
- Normalisasi Aset		(1.560.498.000)
- Reklasifikasi Keluar		(187.551.800)
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		(1.070.000)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	255.705.326.222
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2013		(120.754.199.342)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	Rp	134.951.126.880

Transaksi penambahan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

berikut :

No.	SATUAN KERJA	SALDO AWAL (100)	PEMBELIAN (101)	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP (105)	REKLASIFIKASI MASUK (107)	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LANGSUNG (113)	PENGEMBANGAN NILAI ASET (202)	KOREKSI PENCATATAN NILAI/ KUANTITAS (204)	PENGEMBANGAN MELALUI KDP (208)	TRANSAKSI NORMALISASI BMN ASET TETAP (209)
1	SESTAMA						727.472.000			
2	JATENG						619.421.000	817.740.000		
3	DIY		91.100.000		124.515.000		390.800.000			
4	JATIM	15.100.000					787.213.000			11.857.700
5	ACEH						149.692.400			
6	SUMUT						215.156.200			
7	SUMBAR						39.000.000		450.478.800	
8	JAMBI		79.700.000	374.971.000				6.960.000		
9	SUMSEL		20.037.665			26.502.435	400.386.122			
10	KALBAR						144.434.000			
11	KALTENG				63.036.800				196.485.000	
12	KALSEL								414.440.400	
13	KALTIM			274.280.000			28.350.000		191.788.000	
14	SULUT						410.840.000			
15	SULTENG						547.353.000			
16	SULSEL						521.994.000			
17	MALUKU						127.423.700			
18	BALI						33.252.000		276.389.000	
19	NTB		36.850.000	107.000.000				-		
20	NTT						221.228.000			
21	BENGKULU						239.141.000			
22	MALUT								390.065.000	
23	BANTEN						189.800.000			
24	PAPUA BARAT			8.158.560.388						
25	SULBAR						100.000.000			
JUMLAH		15.100.000	227.687.665	8.914.811.388	187.551.800	26.502.435	5.892.956.422	824.700.000	1.919.646.200	11.857.700

Transaksi pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	SATUAN KERJA	KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS (204)	NORMALISASI ASET TETAP (209)	REKLASIFIKASI KELUAR (304)
1	DIY	-	-	(124.515.000)
2	LAMPUNG	-	(1.560.498.000)	-
3	KALTENG	-	-	(63.036.800)
4	NTB	(1.070.000)	-	-
JUMLAH		(1.070.000)	(1.560.498.000)	(187.551.800)

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

penambahan nilai Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sd 31 Desember 2013 :

No.	Uraian Peruntukan Gedung dan Bangunan	Mata Anggaran Belanja Modal yang Digunakan				Jumlah peruntukkan Gedung dan Bangunan
		533111	533121	533115	532111	
	GEDUNG DAN BANGUNAN:					
1.	Pengembangan Nilai Aset	1.729.162.000	4.014.102.022	-	149.692.400	5.892.956.422
2.	Pengembangan Melalui KDP	610.925.400	1.282.670.800	26.050.000	-	1.919.646.200
3.	Pembelian	227.687.665	-	-	-	227.687.665
4.	Penyelesaian Pembangunan Langsung	26.502.435	-	-	-	26.502.435
5.	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	3.176.608.000	242.180.000	32.100.000	-	3.450.888.000
6.	Ekstrakomplek	-	6.720.000	-	-	6.720.000
7.	Honor Tenaga Ahli	9.410.000	-	-	-	9.410.000
						-
	SELAIN GEDUNG DAN BANGUNAN :					
8.	Pengembangan Nilai Aset (Tanah)	172.550.000	-	-	-	
9.	Pembelian (Peralatan Mesin)	30.188.000	-	-	-	30.188.000
10.	Tanah dalam Pengerjaan	74.986.000	-	-	-	74.986.000
11.	Pembelian (Jalan dan Jembatan)	214.500.000	-	-	-	214.500.000
12.	Pengembangan KDP (pada KDP)	2.499.380.000	1.414.151.000	68.645.000	-	3.982.176.000
13.	Perolehan/Penambahan KDP (pada KDP)	-	6.650.000	-	-	
	JUMLAH BELANJA MODAL	8.771.899.500	6.966.473.822	126.795.000	149.692.400	16.014.860.722

Realisasi Belanja Modal (MAK 53) dalam rangka perolehan Aset Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2013 terdiri dari penggunaan MAK 533 dan MAK 532 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (MAK 533111) senilai Rp.8.771.899.500,-;
2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121) senilai Rp.6.966.473.822,-;
3. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (MAK 533115) senilai Rp.126.795.000,-; dan
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111) senilai Rp.149.692.400,-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

belanja modal dengan peruntukannya, yaitu :

1. Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp.149.692.400,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh menggunakan Belanja Modal MAK 532111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 533121. Pengembangan tersebut berupa pemasangan partisi ruangan yang menambah nilai gedung dan bangunan;
2. Pengembangan Nilai Aset Tanah sebesar Rp.172.550.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menggunakan Belanja Modal MAK 533111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 533121. Selain itu terdapat kesalahan dalam penginputan data kedalam aplikasi SIMAK BMN, dimana nilai tersebut seharusnya merupakan pengembangan terhadap Rumah Dinas Golongan II;
3. Pembelian Peralatan dan Mesin berupa Papan Visual/Papan Nama yang melekat pada gedung bangunan sebesar Rp.30.188.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menggunakan Belanja Modal 533111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 532111;
4. Tanah dalam Pengerjaan sebesar Rp.74.986.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menggunakan Belanja Modal 533111. Ketidaksesuaian terdapat dalam pelaksanaan/realisasinya yaitu berupa pengerjaan pengaspalan; dan
5. Honor tenaga ahli sebesar Rp.9.410.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menggunakan Belanja Modal 533111, yang belum dilakukan penginputan ke dalam aplikasi SIMAK BMN dan akan dilakukan koreksi pada laporan audited.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp.22.224.046.832,- dan Rp.17.278.957.020,-. Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.16.237.076.273,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.5.986.970.559,-.

Mutasi jalan, irigasi dan jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 27 Penambahan dan Pengurangan Nilai jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp.22.224.046.832,-

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Saldo per 31 Desember 2012	Rp 17.278.957.020
Mutasi tambah:	
- Pembelian (Jaringan)	Rp 3.274.025.901
- Pembelian (Jalan dan Jembatan)	Rp 214.500.000
- Pengembangan Nilai Aset	Rp 231.895.950
- Transfer Masuk	Rp 46.530.000
- Reklasifikasi Masuk	Rp 460.833.473
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 1.169.243.961
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp 200
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi Keluar (Jaringan)	(450.833.673)
- Penghentian aset dari penggunaan (Irigasi)	(1.106.000)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp 22.224.046.832
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2013	(5.986.970.559)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	Rp 16.237.076.273

Transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	MUTASI TAMBAH					MUTASI KURANG		
		PEMBELIAN (101)	PENGEMBANGAN NILAI ASET	TRANSFER MASUK	REKLASIFIKASI MASUK (107)	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP	KOREKSI PENCATATAN NILAI/ KUANTITAS	PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN	REKLASIFIKASI KELUAR (304)
1	Sekretariat Utama	2.002.329.521	-	-	183.183.800	950.911.749	-	-	(175.183.800)
2	Direkbrat Advokasi dan KIE	924.000.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Jawa Barat	-	-	-	28.885.100	-	-	-	(26.885.100)
4	Jawa Tengah	172.090.380	-	-	-	-	-	-	-
5	DI. Yogyakarta	-	-	-	5.091.900	-	-	-	(5.091.900)
6	Jawa Timur	4.950.000	-	-	26.884.900	-	200	-	(26.885.100)
7	Aceh	7.250.000	-	-	5.091.900	-	-	-	(5.091.900)
8	Sumatera Utara	-	-	-	5.091.900	-	-	-	(5.091.900)
9	Riau	-	-	-	10.591.900	-	-	-	(10.591.900)
10	Jambi	-	-	46.530.000	10.591.900	-	-	-	(10.591.900)
11	Lampung	-	174.253.750	-	-	-	-	-	-
12	Kalimantan Tengah	-	-	-	10.591.900	-	-	-	(10.591.900)
13	Kalimantan Selatan	-	-	-	10.591.900	-	-	-	(10.591.900)
14	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	(1.106.000)	-
15	Sulawesi Selatan	-	-	-	27.091.900	-	-	-	(27.091.900)
16	Nusa Tenggara Timur	377.906.000	-	-	16.091.000	-	-	-	(16.091.000)
17	Papua	-	57.642.200	-	5.091.900	-	-	-	(5.091.900)
18	Bengkulu	-	-	-	10.591.000	-	-	-	(10.591.000)
19	Maluku Utara	-	-	-	5.091.900	-	-	-	(5.091.900)
20	Banten	-	-	-	15.091.900	-	-	-	(15.091.900)
21	Bangka Belitung	-	-	-	5.091.900	-	-	-	(5.091.900)
22	Gorontalo	-	-	-	5.091.900	-	-	-	(5.091.900)
23	Papua Barat	-	-	-	10.183.800	218.332.212	-	-	(10.183.800)
24	Sulawesi Barat	-	-	-	64.819.173	-	-	-	(64.819.173)
JUMLAH		3.488.525.901	231.895.950	46.530.000	460.833.473	1.169.243.961	200	(1.106.000)	(450.833.673)

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

penambahan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi periode 1 Januari sd. 31 Desember 2013 :

No.	Uraian Peruntukan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Mata Anggaran Belanja Modal yang Digunakan			Jumlah peruntukkan Jalan, Jaringan dan Irigasi
		534131	534161	532111	
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				
1.	Pembelian Jaringan	172.090.380	163.406.000	2.938.529.521	3.274.025.901
2.	Pembelian Jalan dan Jembatan	-	214.500.000	-	214.500.000
3.	Pengembangan Nilai Aset	174.253.750	57.642.200	-	231.895.950
	JUMLAH BELANJA MODAL	346.344.130	435.548.200	2.938.529.521	3.720.421.851

Aset Tetap Lainnya
Rp.4.263.911.292,-

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah Rp. 4.263.911.292,- dan Rp4.153.389.332,- yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.4.216.812.542,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.47.098.750,-.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 disajikan dalam lampiran.

Mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 28 Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013

Saldo per 31 Desember 2012	Rp 4.153.389.332
Mutasi tambah:	
- Saldo Awal	Rp 15.699.700
- Pembelian	Rp 99.572.260
- Reklasifikasi Masuk	Rp 36.763.765
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi Keluar	(36.763.765)
- Penghentian aset dari penggunaan	(4.750.000)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp 4.263.911.292
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2013	(47.098.750)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	Rp 4.216.812.542

Sedangkan penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG	
		SALDO AWAL (100)	PEMBELIAN (101)	REKLASIFIKASI MASUK (107)	REKLASIFIKASI KELUAR (304)	PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN (401)
1	Sekretariat Utama		3.245.000			
2	Advokasi dan Penggerakkan Informasi		52.095.390			
3	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat			36.763.765	(36.763.765)	
4	Perwakilan BKKBN Provinsi DI. Yogyakarta		10.582.300			
5	Perwakilan BKKBN Provinsi Riau		14.950.000			
6	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat	15.699.700				
7	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara		4.950.000			
8	Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku					(4.750.000)
9	Perwakilan BKKBN Provinsi Bali		3.749.570			
10	Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung		10.000.000			

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal MAK 53 dalam rangka penambahan nilai Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sd. 31 Desember 2013 :

No.	Uraian Peruntukan	MAK		Jumlah peruntukan
		536111	532111	
	ASET TETAP LAINNYA			
1.	Pembelian	37.352.260	62.220.000	99.572.260
	LAIN-LAIN			
1.	Pembelian Software	532.353.000	-	532.353.000
2.	Pembelian Lisensi	48.710.000	-	48.710.000
3.	Pembelian Peralatan Mesin	167.600.400	-	167.600.400
	JUMLAH BELANJA MODAL	786.015.660	62.220.000	848.235.660

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp.11.967.763.000,- dan Rp.18.565.102.691,-.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 disajikan dalam lampiran. Sedangkan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 29 Penambahan & Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Saldo per 31 Desember 2012	18.565.102.691
Mutasi Tambah :	
- Perolehan/Penambahan KDP	4.048.410.914
- Pengembangan dengan KDP	7.923.188.907
Mutasi Kurang :	
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(13.243.502.691)
- Penghapusan/penghentian KDP	(15.000.000)
- Koreksi Nilai KDP	(5.310.436.821)
Saldo per 31 Desember 2013	11.967.763.000

Penambahan dan pengurangan Konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN SATKER	SALDO AWAL KDP 1 JANUARI 2013	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG			SALDO AKHIR KDP 31 DESEMBER 2013
			PEROLEHAN/PENAMBAHAN KDP	PENGEMBANGAN KDP	PENGHAPUSAN/PENGHENTIAN KDP	KOREKSI NILAI KDP	REKLASIFIKASI KDP MENJADI BARANG JADI	
1	SESTAMA	4.866.610.091	2.636.127.364	2.652.009.457	-	(5.288.136.821)	(4.866.610.091)	-
2	JATENG	4.095.698.000	-	-	-	-	-	4.095.698.000
3	JATIM	15.000.000	-	-	(15.000.000)	-	-	-
4	PAPUA	3.228.816.000	-	2.568.025.000	-	-	-	5.796.841.000
5	BABEL	676.723.000	-	1.325.801.000	-	-	-	2.002.524.000
6	PAPBAR	5.682.255.600	1.405.633.550	1.289.003.450	-	-	(8.376.892.600)	-
7	SULBAR	-	6.650.000	88.350.000	-	-	-	95.000.000
8	PAPUA	5.774.541.000	-	-	-	(22.300.000)	-	5.752.241.000
	TOTAL	24.339.643.691	4.048.410.914	7.923.188.907	(15.000.000)	(5.310.436.821)	(13.243.502.691)	17.742.304.000

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2013 :

No.	Uraian Peruntukan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kode Mata Anggaran Keluar			Jumlah peruntukkan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
		533111	533121	533115	
1.	Perolehan/Penambahan KDP		6.650.000		6.650.000
2.	Pengembangan KDP	2.499.380.000	1.414.151.000	68.645.000	3.982.176.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.499.380.000	1.420.801.000	68.645.000	3.988.826.000

C.2.7 Akumulasi Penyusutan

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp.367.856.153.747)

Nilai akumulasi penyusutan aset tetapper 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar minus Rp.367.856.153.747,- dan Rp.0,-.

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Tabel. 30 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013

No.	Uraian	per 31 Desember 2013	per 31 Desember 2012
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	Rp (241.067.885.096)	Rp -
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp (120.754.199.342)	Rp -
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp (5.986.970.559)	Rp -
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp (47.098.750)	Rp -
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013		Rp (367.856.153.747)	Rp -

C. 3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp.
8.499.808.374,-

C.3.1 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo piutang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp.8.499.808.374,- dan Rp.8.499.808.374,- merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Penjelasan :

- Sejak Tahun 2006 s/d Tahun 2009, BKKBN telah mendapatkan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp.59.859.000.000,- dengan rincian sbb : Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, Tahun 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,- Tahun 2008 sebesar Rp. 23.970.000.000,- dan Tahun 2009 sebesar Rp. 15.925.000.000,-. Pada periode Tahun Anggaran 2006 dan 2007 merupakan belanja bantuan sosial, berdasarkan peraturan Kepala BKKBN nomor 332/HK.010/F3/2008 tanggal 22 Juli 2008 dana bantuan modal diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS.
- Realisasi jumlah pengiriman dana bantuan modal usaha ke kelompok UPPKS yang berasal dari APBN Pusat dan APBN Provinsi berdasarkan SPM/SP2D pada periode 22 Juli 2008 s/d 31 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 19.670.000.000,-.
- Perkembangan pengembalian sisa dana kelompok UPPKS yang sudah disetor

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

ke kas Negara s/d tanggal 24 desember 2010 adalah Rp. 13.589.568.032,- dari dana sebesar Rp. 19.670.000.000,-, sehingga dana UPPKS yang masih belum dikembalikan sebesar Rp.6.080.431.968,- (out standing) berada di provinsi dan SKPD kab/kota.

Berdasarkan hasil pemetaan I dan II terhadap UPPKS pada Perwakilan BKKBN Provinsi periode 22 Juli 2008 sd. 31 Agustus 2009, maka perkembangan dari piutang bukan pajak sebesar Rp. 6.080.431.968,- adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Bansos menurut BPK yang menjadi Piutang Negara : Rp. 9.262.102.474,-
2. Provinsi yang dana Bansos tidak cair pada mapping II yaitu :
→ Provinsi NTT Rp. 32.500.000,-
3. Provinsi setor dana ke Kas Negara
 - a. Lampung Rp. 4.715.526,-
 - b. Sumatera Barat Rp. 60.000.000,-
 - c. NTT Rp. 86.204.000,-
 - d. Riau..... Rp. 25.750.000,-
 - e. Banten..... Rp. 318.500,-
 - f. Jawa Tengah..... Rp. 245.596.100,-
 - g. Sumatera Utara Rp. 231.145.000,-
 - h. Sumatera Selatan..... Rp. 14.100.000,-
 - i. NTB..... Rp. 47.758.000,-
 - j. Papua..... Rp. 14.206.974,-

Jumlah setor dana ke Kas Negara.....Rp. 729.794.100,-
:Rp. 762.294.100,-

 - **SISA PIUTANG NEGARA :Rp. 8.499.808.374,-**

Dari jumlah dana sebesar Rp. 8.499.808.374,- berpotensi menjadi piutang tak tertagih. BKKBN telah mengusulkan untuk penghapusan piutang ke Kementerian Keuangan dengan surat nomor 2077/KU.301/B3/2012 tgl. 27 Juli 2012 namun sampai saat ini belum ada jawaban atas surat tersebut. Untuk menindaklanjuti surat sebelumnya, pada tanggal 4 Maret 2014 dikirimkan kembali surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 474/KU.301/B3/2014 perihal Permohonan Penghapusan Piutang Tak Tertagih.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Tidak Tertagih –Piutang
jangka panjang lainnya
minus
Rp.8.499.808.374,-

Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar minus Rp.8.499.808.374,- dan minus Rp.8.499.808.374,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– piutang jangka panjang lainnya untuk debitur yang tersebut pada tabel 31 :

Tabel. 31 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang jangka panjang lainnya per 31 Des' 2013

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Macet	1	8,499,808,374	-100.00%	(8,499,808,374)
Total			8,499,808,374		(8,499,808,374)

Aset Lainnya
Rp.26.563.239.087,-

C.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah Rp. 26.563.239.087,- dan Rp.29.516.961.719,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Tabel. 32 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2013

No.	Uraian	per 31 Desember 2013	per 31 Desember 2012
1	Aset Tak Berwujud	Rp 26.226.808.520	Rp 21.769.745.654
2	Aset Lain-Lain	Rp 6.354.214.272	Rp 7.747.216.065
Saldo per 31 Desember 2013		Rp 32.581.022.792	Rp 29.516.961.719
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2013		Rp (6.017.783.705)	-
Nilai Buku per 31 Desember 2013		Rp 26.563.239.087	Rp 29.516.961.719

Aset Tak Berwujud

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Rp.26.226.808.520,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah Rp. 26.226.808.520,- dan Rp 21.769.745.654,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun penambahan dan pengurangan ATB per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel. 33 Rincian Aset tak Berwujud per Satker per 31 Desember 2013

No.	Unit Satuan Kerja	MUTASI TAMBAH				
		PEMBELIAN (101)	TRANSFER MASUK (102)	REKLASIFIKASI MASUK (107)	PENGEMBANGAN NILAI ASET (202)	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DGN KDP
1	Sekretariat Utama	3,040,655,000		612,000		139,652,700
2	Direktorat Advokasi dan KIE	190,575,000				
3	Deputi Advokasi dan Penggerak Informasi	1,028,335,166		23,000,000		
4	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	7,425,000				
5	Perwakilan BKKBN Provinsi DI. Yogyakarta	7,480,000			1,200,000	
6	Perwakilan BKKBN Provinsi Nanggore Aceh Darussalam	7,400,000				
7	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara	2,500,000				
8	Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi	-	8,228,000			
	J U M L A H	4,284,370,166	8,228,000	23,612,000	1,200,000	139,652,700

Sedangkan mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 34 Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013

Saldo per 31 Desember 2012	Rp 21,769,745,654
Mutasi Tambah :	-
- Pembelian	Rp 4,284,370,166
- Transfer Masuk	Rp 8,228,000
- Reklasifikasi Masuk	Rp 23,612,000
- Pengembangan	Rp 1,200,000
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 139,652,700
Mutasi Kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2013	Rp 26,226,808,520

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Aset Tak Berwujud periode 1 Januari sd 31 Desember 2013 :

No.	Uraian Peruntukan	Kode Mata Anggaran Keluar			Jumlah peruntukkan
		532111	523111	536111	
	ASET TAK BERWUJUD				
1	Pembelian Software	232,180,000	407,846,703	532,353,000	1,172,379,703
2	Pembelian Lisensi	3,065,165,000	46,825,463		3,111,990,463
3	Pengembangan aset	1,200,000			1,200,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	3,298,545,000	454,672,166	532,353,000	4,285,570,166

Rincian penggunaan/realisasi belanja modal dengan menggunakan kode MAK 536111 yang digunakan untuk penambahan aset peralatan mesin dan aset tetap lainnya dengan rincian :

No.	Uraian Peruntukan	Kode Mata Anggaran Keluar
		536111
1	Pembelian Aset Tetap Lainnya	37,352,260
2	Pembelian Peralatan Mesin	167,600,400
	JUMLAH BELANJA MODAL	204,952,660

C.4.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp.6.354.214.272,-

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah Rp.6.354.214.272,- dan Rp.7.747.216.065,- yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sedangkan nilai buku Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.336.430.56,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp.6.017.783.705,-. Sedangkan mutasi Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Tabel. 35 Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2013

Saldo per 31 Desember 2012	Rp 7,747,216,065
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	Rp 2,336,358,524
Mutasi kurang:	
- Normalisasi BMN yang dihentikan	(192,190,200)
- Penghapusan (BMN yg dihentikan)	(3,325,966,881)
- Reklas Keluar (BMN yg Dihentikan)	(60,220,046)
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN (BMN yg dihentikan)	(97,996,590)
- Usulan Barang Hilang ke Pengelola BMN (BMN yg dihentikan)	(8,000,000)
- Penggunaan Kembali BMN yg sdh dihentikan	(44,986,600)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp 6,354,214,272
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2013	(6,017,783,705)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	Rp 336,430,567

Penambahan dan pengurangan aset lain-lain adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang			
		REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA (188)	NORMALISASI BMN YANG DIHENTIKAN (299)	PENGHAPUSAN BMN YANG DIHENTIKAN (391)	REKLAS KELUAR (BMN YANG DIHENTIKAN) (394)	USULAN BARANG RUSAK BERAT KE PENGELOLA (BMN YANG) (398)	USULAN BARANG HILANG KE PENGELOLA (BMN YANG DIHENTIKAN) (398)	PENGGUNAAN KEMBALI BMN YANG SUDAH DIHENTIKAN (402)
1	SESTAMA	302,720,000	(21,000,000)	(296,738,700)				
2	KBKR	18,040,000						
3	JABAR	208,582,346						
4	JATENG			(130,748,000)				
5	DIY	74,000,000		(273,398,000)				
6	JATIM		(7,407,000)	(32,700,000)				
7	ACEH	8,000,000	(39,142,000)				(8,000,000)	
8	SUMUT			(217,252,000)				
9	SUMBAR			(187,977,100)				
10	RIAU	3,014,000	(2,000,000)	(79,900,000)				
11	JAMBI	92,630,300	(92,200)	(196,150,808)				
12	SUMSEL	111,255,000	(29,599,000)					
13	LAMPUNG		(254,000)					
14	KALBAR	283,215,590	(580,000)	(714,851,300)		(97,996,590)		(16,397,600)
15	KALTENG	60,000,046	(2,000,000)		(46)			
16	KALSEL	82,769,000		(82,769,000)				
17	KALTIM	159,404,685	(60,000)					(100,000)
18	SULUT	35,260,000		(200,352,600)	(35,260,000)			
19	SULTENG	24,960,000		(116,546,000)	(24,960,000)			
20	SULSEL	29,256,500	(56,000)	(224,102,500)				
21	IMALLUKU	555,573,857		(60,480,000)				
22	BALI			(38,000,000)				
23	NTT			(77,022,300)				(20,012,000)
24	PAPUA	72,838,600						
25	MALUT			(128,448,773)				
26	BABEL			(84,667,000)				
27	KEPRI	169,838,600		(39,700,000)				(8,477,000)
28	PAPBAR	45,000,000	(90,000,000)	(144,162,800)				
JUMLAH		2,336,358,524	(192,190,200)	(3,325,966,881)	(60,220,046)	(97,996,590)	(8,000,000)	(44,986,600)

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp.6.017.783.705,-)

C.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar minus Rp 6.017.783.705,- dan Rp0,-.

Nilai akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Tabel. 36 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013

No.	Uraian	per 31 Desember 2013	per 31 Desember 2012
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp (6,017,783,705)	Rp -
Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2013		Rp (6,017,783,705)	Rp -

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka
Pendek
Utang kepada Pihak
Ketiga Rp.738.923.724,-

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp. 738.923.724,- dan Rp144.198.073,- merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel. 37 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013

No.	Uraian Satker	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111)	Belanja barang yang masih harus dibayar (212112)	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)	Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per Satker
1	Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Tengah	1,440,000	53,981,505	-	55,421,505
2	Perwakilan BKKBN Prov. D.I. Yogyakarta	-	-	235,190,800	235,190,800
3	Perwakilan BKKBN Prov. Lampung	-	16,571,176	-	16,571,176
4	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan	-	16,962,496	-	16,962,496
5	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Utara	7,263,663	94,184,479	(91,017,142)	10,431,000
6	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Tenggara	5,479,854	-	-	5,479,854
7	Perwakilan BKKBN Prov. Nusa Tenggara Barat	-	1,299,100	-	1,299,100
8	Perwakilan BKKBN Prov. Nusa Tenggara Timur	349,800	-	-	349,800
9	Perwakilan BKKBN Prov. Bengkulu	26,551,386	(22,232,380)	-	4,319,006
10	Perwakilan BKKBN Prov. Kepulauan Riau	-	-	12,780,692	12,780,692
11	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Barat	-	-	7,912,727	7,912,727
12	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Timur	-	873,890	-	873,890
13	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Tengah	-	12,681,523	-	12,681,523
14	Satker Sestama	-	326,150,155	-	326,150,155
15	Satker Deputi KBKR	-	-	32,500,000	32,500,000
Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per Akun		41,084,703	500,471,944	197,367,077	738,923,724

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Uang Muka dari KPPN
Rp. 11.483.264.463,-

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp.11.483.264.463,- dan Rp. 3.678.008.618,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp.423.040.333,-

C.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp.423.040.333,- dan Rp.0,- merupakan barang/jasa yang masih harus diserahkan kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 38 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013

No.	Satker	Total Sewa	Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013
	Sekretariat Utama		
1	Pendapatan sewa Gedung BNI selama 3 tahun (05-05-2013 sd. 04-05-2016)	Rp. 409,269,000	Rp. 318,320,333
2	Pendapatan sewa Gedung BRI selama 3 tahun (01-08-2012 sd. 01-08-2015)	Rp. 180,180,000	Rp. 95,095,000
3	Pendapatan sewa lokasi ATM BRI selama 5 tahun (26-09-2010 sd 26-09-2015) Perwakilan BKKBN Prov. Sulteng	Rp 27,500,000.00	Rp 9,625,000.00
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013			423,040,333

Pendapatan Yang
Ditangguhkan Rp.
2.369.835.612,-

C.5.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp.2.369.835.612,- dan Rp.1.483.703,- merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Akun ini merupakan akun penyeimbang Kas di Bendahara Penerimaan Satker Sekretariat Utama sebesar Rp.6.253,-.

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar
Rp.534.050.656.021,-

C.6 Ekuitas Dana Lancar

C.6.1 Cadangan Piutang

Cadangan Piutang
Rp. 351.299.155,-

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp 351.299.155,- dan Rp1.340.514,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

Barat, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara dan Sekretariat Utama dalam bentuk piutang jangka pendek setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Akun ini merupakan akun penyeimbang Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto).

C.6.2 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp. 534.233.212.363,- dan Rp 632.375.797.484,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam bentuk persediaan.

C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar minus Rp.471.232.924,- dan minus Rp.144.198.073,-. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Akun ini merupakan akun penyeimbang Utang kepada Pihak Ketiga, terdiri dari :

Tabel. 39 Rincian Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013

No.	Uraian Satker	Jumlah dana yg hrs disediakan utk
1	Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Tengah	(55,421,505)
2	Perwakilan BKKBN Prov. Lampung	(16,571,176)
3	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan	(16,962,496)
4	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Utara	(10,431,000)
5	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Tenggara	(5,479,854)
6	Perwakilan BKKBN Prov. Nusa Tenggara Barat	(1,299,100)
7	Perwakilan BKKBN Prov. Nusa Tenggara Timur	(349,800)
8	Perwakilan BKKBN Prov. Bengkulu	(4,319,006)
9	Perwakilan BKKBN Prov. Kepulauan Riau	(12,780,692)
10	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Barat	(7,912,727)
11	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Timur	(873,890)
12	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Tengah	(12,681,523)
13	Satker Sestama	(326,150,155)
	Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per Akun	(471,232,924)

C.6.4 Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Ekuitas dana lancar lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp.332.217.761,- dan Rp.141.586.527,-.Ekuitas dana lancar lainnya merupakan penyeimbang kas dan setara kas lainnya pada kelompok aset lancar dan merupakan sisa dana hibah luar negeri (UNFPA) pada satker KBKR yang akan digulirkan/diluncurkan kembali pada tahun anggaran 2013.

Barang/jasa yg masih hrs diterima Rp. 28.199.999,-

C.6.5 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp28.199.999,- dan Rp55.033.333,-. Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain dan merupakan penyeimbang akun Belanja Dibayar Dimuka (prepaid).

Barang/jasa yg masih harus diserahkan minus Rp. 423.040.333,-

C.6.6 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang harus diserahkan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar minus Rp. 423.040.333,- dan Rp0,-. Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana investasi berupa barang/jasa yang masih harus diserahkan kepada pihak lain dan merupakan penyeimbang akun Pendapatan Diterima Dimuka.

Ekuitas Dana Investasi Rp.675.475.077.244,-

C.7 Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 648.911.838.157,-

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.648.911.838.157,- dan Rp.944.773.377.927,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

Diinvestasikan dlm aset lainnya Rp. 26.563.239.087,-

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah diinvestasikan dalam aset lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp. 26.563.239.087,- dan Rp29.518.302.233,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk aset lainnya.

Akun ini merupakan penyeimbang aset lainnya sebesar Rp.26.563.239.087,-..

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Berdasarkan surat pernyataan dari bendahara satker Deputi Bidang ADPIN tanggal 15 Januari 2014 terdapat kelebihan setoran Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 45,- dan kelebihan setoran UP tersebut telah diralat dari kode MAK 815111 ke kode MAK 423999. Sampai dengan tanggal pelaporan belum ada surat konfirmasi dari KPPN sehingga SAU belum membukukan ralat split tersebut.

D.2. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran

D.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagaimana terlampir

D.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pagu anggaran BKKBN tahun 2013 sebesar Rp. 2.601.855.775.000,- bertambah menjadi Rp 2.697.010.456.000,-. Dengan rincian perubahan sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat dari Kemenkeu Nomor S-407/MK.02/2013 tgl. 18 Juni 2013 perihal anggaran belanja K/L dalam APBNP, anggaran BKKBN diefisiensi sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
 - Berdasarkan surat dari Kemenkeu S-73/MK.02/2013 tgl. 4 Februari 2013 perihal Penyediaan Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun 2013, pemotongan anggaran di beberapa satker untuk kontribusi tunjangan kinerja sebesar Rp. 28.090.035.000,-;
 - Penambahan pagu tunjangan kinerja sebesar Rp. 140.450.183.000,-
 - Penambahan Hibah dalam negeri pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 17.384.700.000,-;
 - Berdasar surat Kementerian keuangan nomro S-461/MK.02/2013 tgl. 11 Juli 2013 perihal tindak lanjut program/kegiatan prioritas

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

pemerintah yang masih dialokasikan pada BA (999) Bendahara Umum Negara, BKKBN menerima penambahan pagu anggaran Direktif Presiden sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk Program Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2013;

- Penambahan pagu UNFPA sesuai dengan SP DIPA TA 2013 tanggal 20 Desember 2013 menjadi Rp. 6.079.833.000,-.
 - Penerimaan hibah dalam bentuk jasa dari UNFPA sebesar Rp. 19.534.263.491,-. Hibah dalam bentuk jasa ini merupakan bagian dari komitmen hibah dengan register 71509501.
 - Saldo kas lainnya dan setara kas pada Satker Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebesar Rp.364.717.761,- merupakan koreksi BPK atas rekening hibah UNFPA yang terdiri dari saldo rekening koran per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 362.994.676,- dan cash on hand sebesar Rp. 1.723.085,-. Pada saldo rekening koran per 31 Desember 2013 tersebut masih terdapat anggaran untuk kegiatan yang tercatat di tahun 2013 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2014 sebesar Rp. 32.500.000,-.
 - Saldo awal hibah UNFPA tahun 2013 sebesar Rp. 141.586.527,-, Pendapatan hibah UNFPA tahun 2013 sebesar Rp. 5.247.443.814,- dan selama tahun 2013 dibelanjakan sebesar Rp. 4.969.226.959,- terdapat saldo akhir sebesar Rp. 419.803.382,- sesuai SP2HL nomor 010139/KBKR/649505/E1/2013 tgl. 31 Desember 2013 dan disahkan dengan SPHL nomor 257573Y/140/701 tgl. 31 Desember 2013.
2. Permasalahan – permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:
- Terkait dengan sumber daya manusia dalam penatausahaan barang milik negara, terdapat permasalahan antara lain :
 - a. masih terjadi pergantian petugas SIMAK-BMN tanpa didahului kaderisasi yang baik;
 - b. minimnya jumlah petugas yang memiliki pemahaman baik tentang penatausahaan BMN serta aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi Persediaan.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

- Masih terdapat kesalahan klasifikasi jenis belanja dalam perencanaan penganggaran yang tidak sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS);
 - Kurang tepatnya dalam penggunaan kodefikasi barang yang sesuai dengan jenis aset pada saat penginputan;
 - Masih kurangnya koordinasi antara petugas operator SIMAK-BMN dengan pengelola keuangan.
3. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan BKKBN TA 2013 terkait Penatausahaan Barang Milik Negara dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
- Masih kurang tertibnya pencatatan dan pelaporan Persediaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Terdapat persediaan yang kondisinya sudah usang/rusak/kadaluarsa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan yang masih tercatat di Neraca per 31 Desember 2013;
 - b. Terdapat Persediaan yang dilaporkan dalam Laporan Persediaan per 31 Desember 2012 yang tidak menggunakan harga perolehan terakhir;
 - c. Terdapat perbedaan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik dengan Kuantitas Persediaan yang dilaporkan dalam Aplikasi Persediaan/Laporan Mutasi Barang Persediaan per 31 Desember 2013;
 - Terdapat kesalahan penggunaan MAK dalam pembelian Barang Milik Negara yang mengakibatkan aset tidak terkapitalisasi ke dalam Neraca BMN BKKBN;
 - Terdapat aset yang sudah tidak digunakan dan Rusak Berat belum tercatat di Aset Lain-lain;
 - Lebih catat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada neraca per 31 Desember 2013;
 - Terdapat penghapusan barang milik negara yang sudah ditindaklanjuti dengan proses lelang namun masih tercatat di Neraca BKKBN per 31 Desember 2013;

4. Terdapat beberapa perubahan pada jurnal koreksi Neraca Audited antara lain :
- a. Akun Gedung bangunan;
Terdapat koreksi senilai Rp 47.787.000,-, berupa reklasifikasi akun aset lain-lain menjadi akun gedung bangunan. Namun proses reklasifikasi tidak dapat diterapkan pada aplikasi SIMAK BMN karena adanya permasalahan pada aplikasi sehingga koreksi akan dilakukan pada Semester I TA 2014;
 - b. Akun Peralatan Mesin
Terdapat koreksi senilai Rp 15.895.000,- berupa reklasifikasi akun peralatan mesin menjadi akun aset lain-lain. Namun terhadap jurnal koreksi ini tidak dapat diterapkan pada aplikasi karena aset yang akan dilakukan reklasifikasi tercatat sebagai aset ekstrakomptabel aset tersebut berupa Kursi Kayu NUP 44-53. Sedangkan satu aset berupa Sun Screen NUP 1 sudah tercatat sebagai aset yang dihentikan dari penggunaan;
- Berdasarkan saldo akhir hibah UNFPA tahun 2013 sebesar Rp. 419.803.382,- terdapat pengembalian pendapatan hibah sebesar Rp. 87.585.621,- sesuai dengan SP4HL nomor 01040/KBKR/649505/E1/2013 tgl 31 Desember 2013 dan disahkan dengan SP3HL nomor 257574Y/140/701 tgl. 31 Desember 2013.

**Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional
K e p a l a,**

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, SpGK
NIP. 19530901 198203 1 001